

**KEPENTINGAN KOREA SELATAN TERHADAP INDONESIA MELALUI
KEBIJAKAN *NEW SOUTHERN POLICY***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

**QINTARA SHALSABILA HELMAN
NIM I02218023**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
DESEMBER 2022**

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qintara Shalsabila Helman

NIM : I02218023

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Kepentingan Korea Selatan Terhadap Indonesia Melalui Kebijakan *New Southern Policy*.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 21 Desember 2022

Yang menyatakan



Qintara Shalsabila Helman
NIM I02218023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Qintara Shalsabila Helman

NIM : 102218023

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul **“Kepentingan Korea Selatan Terhadap Indonesia Melalui Kebijakan *New Southern Policy*”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 21 Desember 2022

Pembimbing



Zaky Ismail, M.Si
NIP 198212302011011007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Qintara Shalsabila Helman dengan judul: “**Kepentingan Korea Selatan Terhadap Indonesia Melalui Kebijakan *New Southern Policy***” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 28 Desember 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I


Zaky Ikhsani, M.Si.
NIP 198212302011011007

Penguji II


Ridha Amaliyah, S.IP., MBA
NUP 201409001

Penguji III


Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

Penguji IV


M. Jave Zulkarnain, S.Pd.I., M.A.
NUP 202111003

Surabaya, 10 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qintara Shalsabila Helman
NIM : I02218023
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional
E-mail address : rayfisha30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEPENTINGAN KOREA SELATAN TERHADAP INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN

NEW SOUTHERN POLICY

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2023

Penulis



(Qintara Shalsabila Helman)

Abstract

Qintara Shalsabila Helman, 2022. South Korea's Interests in Indonesia Through the New Southern Policy

Keywords: Interests, New Southern Policy (NSP), South Korea, Indonesia

The New Southern Policy is a new South Korean policy established during President Moon Jae In's administration with the aim of targeting improving relations with ASEAN countries and India. Previously, the direction of South Korea's foreign policy always led to the Major Powers (China, Japan, Russia and the United States). This is what makes researchers interested in discussing South Korea's interests through the New Southern Policy, especially in Indonesia. This study attempts to describe South Korea's economic interests in Indonesia through the New Southern Policy with a descriptive qualitative research approach. Data collection was obtained by documentation and interview techniques. Researchers found that South Korea has an interest in Indonesia to create a wider market for South Korean products and make it easier for South Korean investors to enter Indonesia.

Abstrak

Qintara Shalsabila Helman, 2022. Kepentingan Korea Selatan Terhadap Indonesia

Kata kunci: Kepentingan, *New Southern Policy* (NSP), Korea Selatan, Indonesia

Kebijakan *New Southern Policy* merupakan kebijakan Korea Selatan yang baru ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In dengan tujuan menyasar peningkatan hubungan dengan negara ASEAN dan India. Sebelumnya, arah kebijakan luar negeri Korea Selatan selalu mengarah pada negara Major Powers (China, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat). Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk membahas kepentingan Korea Selatan melalui kebijakan *New Southern Policy* khususnya di Indonesia. Penelitian ini berusaha menjabarkan kepentingan ekonomi Korea Selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan *New Southern Policy* dengan jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Peneliti menemukan, Korea Selatan memiliki kepentingan di Indonesia untuk menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk Korea Selatan dan mempermudah investor Korea Selatan untuk memasuki Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Argumentasi Utama	21
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II Landasan Konseptual	
A. Definisi Konseptual.....	24
1. Kepentingan	24
2. <i>New Southern Policy</i> (NSP)	25
B. Kerangka Konseptual	26

1. Kepentingan Nasional	26
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu	32
C. Tahap-Tahap Penelitian	33
D. Tingkat Analisa Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV Penyajian dan Analisis Data	
A. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan	42
1. Masa Orde Lama	42
2. Masa Orde Baru	43
3. Masa Reformasi	44
B. Strategi Korea Selatan dalam Mempengaruhi ASEAN melalui <i>New Southern Policy</i>	57
C. Penerapan Kebijakan <i>New Southern Policy</i> di Indonesia	60
1. Kebijakan <i>New Southern Policy</i>	60
2. <i>Special Strategic Partnership</i> Korea Selatan dan Indonesia.....	67
D. Implementasi kebijakan <i>New Southern Policy</i> dalam Kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia.....	71
1. Peningkatan Perdagangan melalui IK-CEPA.....	71
2. Peningkatan Investasi Perusahaan Korea Selatan di Indonesia	78
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86

LAMPIRAN.....	97
---------------	----



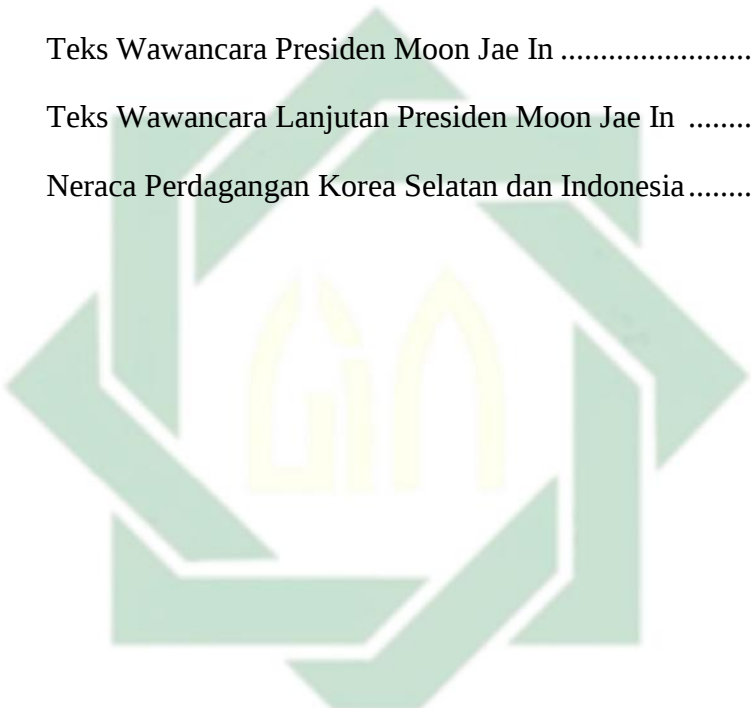
DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Nilai Impor Korea Selatan ke Indonesia 2017-2021.....	92
------------	---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Mitra dagang utama Korea Selatan di ASEAN.....	60
Gambar 4.2	Teks Wawancara Presiden Moon Jae In	64
Gambar 4.3	Teks Wawancara Lanjutan Presiden Moon Jae In	65
Gambar 4.4	Neraca Perdagangan Korea Selatan dan Indonesia	74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara yang berdaulat tentunya akan memiliki suatu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan aspek penting bagi suatu Negara, karena kebijakan tersebut merupakan pondasi suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain secara internasional. Dalam perumusannya, kebijakan luar negeri suatu negara akan selalu didasari pada kepentingan nasional negara tersebut. Karena salah satu tujuan adanya kebijakan luar negeri yaitu untuk membantu dan menyelesaikan masalah di dalam Negara. Sebagaimana pendapat Kegley dan Wittkopf bahwa kebijakan luar negeri merupakan kebijakan yang mengarah kepada lingkungan internasional yang didasari atas kepentingan dan tujuan nasional serta terdapat nilai-nilai dan instrumen dalam mengejar tujuan tersebut.¹

Korea Selatan merupakan suatu negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Negara ini bertetangga dekat dengan China dan Jepang. Sehingga tidak mengherankan kedua negara tersebut merupakan mitra Kerjasama yang sering dituju Korea Selatan. Selain Jepang dan China, Amerika Serikat dan Rusia juga menjadi mitra kerjasama Korea Selatan sejak lama. Hubungan diplomasi Korea Selatan dengan empat negara tersebut menyebabkan 80 persen sumber daya diplomasi Korea Selatan

¹ Charles W. Kegley and Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, (6th ed). (New York: St.Martin's Press, 2001), 55.

tertuju pada empat negara tersebut.² Namun pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae In tahun 2017 Korea Selatan mulai mengubah arah politik luar negerinya dengan menetapkan kebijakan baru yaitu *New Southern Policy* (NSP).

Kebijakan *New Southern Policy* yang dirumuskan oleh Moon Jae In ini merupakan kebijakan luar negeri baru yang mengarah pada negara ASEAN dan India. NSP sendiri merupakan bagian dari kebijakan *Northeast Asia Plus Community for Responsibility-Sharing*. Terdapat tiga komponen kebijakan di dalamnya yaitu, *New Northern Policy* (NNP), *Northeast Asia Peace and Cooperation Platform* (NEAPCP), dan *New Southern Policy* (NSP). Sementara tujuan dalam NEAPC, yaitu memperkuat kerjasama trilateral (antara China, Korea Selatan, dan, Jepang) dan meneruskan *six party talks* yang pernah diadakan di tahun 2003, menciptakan NEAPC yang berintegrasi dengan kerja sama keamanan multilateral dan masyarakat ekonomi; dan menjadikan negara ASEAN dan India sejajar dengan empat *major powers* (China, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat) sebagai mitra ekonomi dan politik yang strategis bagi Korea Selatan.³ NEAPC dan NNP merupakan kebijakan yang hampir selalu ditetapkan dalam setiap pemerintahan, akan tetapi NSP merupakan kebijakan baru yang merupakan tambahan di masa pemerintahan Presiden Moon Jae In. Dengan

² “Tantangan Ambisi Seoul di Asia Tenggara,” *kompas.id*, 15 April 2021, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/04/15/tantangan-ambisi-seoul-di-asia-tenggara/>.

³ Khirana Wahyuningsih, “Faktor-Faktor Korea Selatan Meningkatkan Strategic Partnership Menjadi Special Strategic Partnership Terhadap Indonesia Tahun 2017,” 18 Mei 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57083>.

dirumuskannya kebijakan NSP diharapkan Korea Selatan dapat meningkatkan status hubungan diplomatik dengan negara ASEAN dan India. Disamping itu, Korea Selatan ingin menjadikan ASEAN dan India selaku negara *middle power* sebagai mitra diplomatik prioritas agar tidak hanya bergantung pada empat *major powers*.

Kebijakan *New Southern Policy* sendiri berfokus pada tiga pilar utama yaitu Pengembangan masyarakat (*People*), kesejahteraan (*Prosperity*), dan perdamaian (*Peace*). Tujuan NSP terhadap masyarakat yaitu menciptakan kehidupan yang lebih aman, lebih baik, dan menciptakan interaksi yang lebih dalam terhadap negara-negara tujuan NSP. Kesejahteraan bertujuan untuk membentuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan mengarah pada masa depan. Perdamaian bertujuan untuk menciptakan komunitas yang bebas dari ketakutan dan ancaman.⁴ Berdasarkan analisis surat kabar *The Korea Herald* edisi November 2017, melalui kebijakan NSP ini Presiden Moon berharap dapat meningkatkan perdagangan antara Korea Selatan dan ASEAN sebesar 200 miliar USD paling lambat tahun 2020. Pada tahun 2016 perdagangan antara keduanya meningkat lima belas kali lipat dari tahun 1989 dengan nominal mencapai 119 miliar USD.⁵

⁴ “The New Southern Policy Plus Progress and Way Forward | World Economy Brief | Publications : Korea Institute for International Economic Policy,” diakses 19 Mei 2022, https://www.kiep.go.kr/gallery.es?mid=a20301000000&bid=0001&list_no=9932&act=view.

⁵ IPDForum, “Korea Selatan meningkatkan hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN | Indo-Pacific Defense Forum,” 10 April 2018, <https://ipdefenseforum.com/id/2018/04/korea-selatan-meningkatkan-hubungan-dengan-negara-negara-anggota-asean/>.

Kebijakan NSP merupakan kebijakan yang ditujukan untuk negara ASEAN, namun dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan bahasan kepada Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang aktif dan memiliki peran penting dalam ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari Indonesia sebagai salah satu pelopor terbentuknya ASEAN, penggagas ASC (*Asean Security Community*) yang bertujuan menciptakan perdamaian Kawasan, pelopor KTT pertama, dan menjadi penengah konflik dan perang sipil di Kamboja.⁶ Dalam hubungan Korea Selatan dan ASEAN Indonesia memiliki peran penting yaitu sebagai negara koordinator dalam kerja sama antara ASEAN-Korea Selatan tahun 2015-2018. Pencapaian Indonesia dalam hal ini diresmikannya *ASEAN Culture House* pada 1 September 2017 di Busan. Selain itu, Indonesia juga menjadi tujuan investor Perusahaan Korea Selatan seperti Samsung dan Hyundai.⁷ Aspek-aspek di atas menjadi poin positif Indonesia bagi Korea Selatan, posisi penting dan keaktifan Indonesia dalam ASEAN dapat membantu Korea Selatan dalam merealisasikan agenda dalam kebijakan NSP. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk tertinggi di ASEAN yang dapat menjadi pasar yang sangat bagus bagi produk Korea Selatan.

Dalam merealisasikan kebijakan NSP, Moon Jae In pada kunjungan pertamanya sebagai Presiden memilih Indonesia sebagai negara tujuan

⁶ “Simak! Ini 7 Peran Indonesia dalam ASEAN yang Harus Diketahui,” diakses 19 Mei 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5577699/simak-ini-7-peran-indonesia-dalam-asean-yang-harus-diketahui>.

⁷ Annisa Rohmaniah, “PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA ASEAN-KOREA SELATAN MELALUI ASEAN-KOREA CENTRE,” 483, diakses 16 Januari 2022, <https://core.ac.uk/reader/234030476>.

pertama di ASEAN tepatnya pada November 2017 di Jakarta. Hal ini menunjukkan keistimewaan Indonesia bagi Korea Selatan dalam menjalankan kebijakan NSP sekaligus sebagai *partner* kerja sama bilateral. Dalam kunjungan Presiden Moon Jae In pada 2017 menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya kesepakatan untuk meningkatkan status hubungan Indonesia dan Korea Selatan dari *strategic partnership* menjadi *special strategic partnership*. *Special strategic partnership* sendiri memiliki empat fokus cangkupan kerjasama diantaranya, *people to people exchanges*, pertahanan dan hubungan luar negeri, pembangunan infrastruktur dan perdagangan bilateral, serta kerjasama regional dan global.⁸ Selain itu pada forum bisnis Korea Selatan-Indonesia yang diadakan di Jakarta, Presiden Moon menyampaikan komitmennya terhadap kemajuan kemitraan ekonomi antara Korea Selatan dan ASEAN khususnya Indonesia yang dinilai sebagai pemimpin yang memiliki prospek yang baik.⁹

Merespon kunjungan Presiden Moon Jae In yang berniat untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia, Presiden Jokowi membalas kunjungan tersebut pada November 2018 di Seoul. Pada pertemuan tersebut Presiden Moon mengistimewakan Presiden Jokowi dengan menyambutnya di Istana Changdeok. Menurut Kim Chang Beom, hal ini merupakan pertama kalinya Presiden Korea Selatan menyambut tamunya di Istana

⁸ “KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SEOUL, REPUBLIK KOREA,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses 16 Januari 2022, <https://kemlu.go.id/seoul/id>.

⁹ “Presiden Moon Janji Akan Bangun Korea Selatan sebagai Negara Pemimpin Dunia,” diakses 16 Januari 2022, http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=58759.

Changdeok.¹⁰ Fakta ini menunjukkan keistimewaan dan pentingnya posisi yang dimiliki Indonesia dalam kebijakan NSP Korea Selatan. Serta keinginan Korea Selatan untuk semakin mempererat hubungan bilateral dengan Indonesia.

Secara Internasional, Korea Selatan dan Indonesia merupakan negara yang memiliki ekonomi kuat. Keduanya tergabung dalam G20 yang merupakan perkumpulan negara ekonomi terkuat di dunia. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tergabung di dalamnya. Kedua negara juga aktif dan saling mendukung satu sama lain dalam berbagai forum internasional dan regional.¹¹ Hubungan baik antara kedua negara ini sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu, dimana hubungan tingkat konsuler sudah berlangsung sejak Agustus 1966, dan hubungan diplomatik sendiri mulai berlangsung pada September 1973.

Hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia terus berlanjut dan berkembang dari tahun ke tahun. Namun, sejak pemerintahan Presiden Moon hubungan ini menjadi semakin intim. Indonesia bahkan menjadi fokus utama dan mitra mutlak dalam kebijakan NSP. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung Wha saat menyampaikan pernyataan pers bersama Menlu RI Retno Marsudi usai Sidang Komisi Bersama (JCM) ke-3 RI-Korsel di Jakarta. Kebijakan Baru

¹⁰ “Jokowi Jadi Presiden Pertama Disambut di Istana Changdeok Korsel - News Liputan6.com,” diakses 16 Januari 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/3640927/jokowi-jadi-presiden-pertama-disambut-di-istana-changdeok-korsel>.

¹¹ “KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SEOUL, REPUBLIK KOREA.” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses 16 Januari 2022, <https://kemlu.go.id/seoul/id>.

ke Arah Selatan ini adalah jangkar bagi pemerintah kami untuk memperluas hubungan yang kami miliki dengan negara-negara ASEAN, di mana Indonesia berada di pusatnya dan menjadi mitra yang mutlak. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Indonesia merupakan salah satu sasaran utama dalam kebijakan NSP.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, sejak pemerintahan Presiden Moon Jae In Korea Selatan mulai memutar arah kebijakan luar negerinya dari yang awalnya hanya fokus kepada negara-negara *major powers* (US, China, Rusia, Jepang) menjadi melirik negara-negara *middle power* seperti ASEAN, khususnya Indonesia. Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih dalam dibalik kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan NSP. Dimana peneliti akan menjabarkan kepentingan Korea Selatan berfokus pada kepentingan ekonomi. Disamping itu peneliti akan menjabarkan implementasi dari penerapan kebijakan NSP di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan *New Southern Policy*?

¹² “Menlu Kang: Indonesia berada di pusat ‘New Southern Policy’ Korea - ANTARA News,” diakses 16 Januari 2022, <https://www.antaranews.com/berita/821806/menlu-kang-indonesia-berada-di-pusat-new-southern-policy-korea>.

2. Bagaimana implementasi kebijakan *New Southern Policy* terhadap Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan *New Southern Policy*, serta implementasi dari kebijakan tersebut di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian penting untuk dicapai untuk menambah dan memperluas pengetahuan bagi para pembaca. Oleh karenanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat akademis dan praktis kepada pembaca.

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat memperluas pemikiran dan pengetahuan dalam studi hubungan internasional, serta dapat dijadikan sebagai referensi, tinjauan pustaka maupun rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan pembaca terkait terkait topik dan isu internasional kontemporer, khususnya dalam bidang politik luar negeri dan kerjasama bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia melalui NSP.
- c. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca terkait kepentingan Korea Selatan

terhadap Indonesia melalui kebijakan NSP dan alasan dibalik
ditetapkannya kebijakan NSP oleh Presiden Moon Jae In.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat terhadap pemerintah Korea Selatan dan Indonesia dalam meningkatkan hubungan bilateral dan mengaplikasikan kebijakan NSP secara optimal.

3. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam mengaplikasikan teori-teori hubungan internasional yang telah didapat selama menjalani pendidikan strata satu.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini bertujuan sebagai dasar gambaran terkait topik penelitian yang akan diteliti. Sehingga diharapkan peneliti dapat lebih dalam memahami terkait topik penelitian.

Tinjauan Pustaka pertama yaitu skripsi berjudul “*Analisis Munculnya Kebijakan New Southern Policy Korea Selatan di Bawah Administrasi Moon Jae In Tahun 2017*” yang ditulis oleh Mohammad Wira Aditya Makdum tahun 2020.¹³ Penelitian ini menjelaskan terkait faktor eksternal dan internal yang melatar belakangi kebijakan *New Southern Policy*. Faktor internal yang dikaji dalam penelitian ini yakni perpindahan

¹³ MOHAMMAD WIRA ADITYA MAKDUM, “ANALISIS MUNCULNYA KEBIJAKAN NEW SOUTHERN POLICY KOREA SELATAN DI BAWAH ADMINISTRASI MOON JAE IN TAHUN 2017” (undergraduate, UPN “VETERAN” JAWA TIMUR, 2020), <http://repository.upnjatim.ac.id/2276/>.

kepemimpinan dari Park Geun Hye ke Moon Jae In. Tentunya dari perbedaan personalitas pemimpin akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan pergerakan politik yang berbeda. Sementara dari segi eksternal yaitu posisi Korea Selatan yang dihipit kepentingan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China sering menimbulkan dilema bagi Korea Selatan. Selain itu tidak stabilnya politik Kawasan di Asia Timur menyebabkan Korea Selatan mengeluarkan kebijakan baru *New Southern Policy*. Korea selatan memandang ASEAN dan India sebagai partner potensial. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kerjasama yang signifikan antara Korea Selatan dan negara ASEAN dan India, serta trend budaya Korea Selatan yang banyak digemari di negara ASEAN dan India. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menjelaskan masalah Korea Selatan dan China akibat isu THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*). Sementara yang menjadi pembeda adalah peneliti hanya akan menjabarkan kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui *New Southern Policy* secara lebih khusus.

Tinjauan Pustaka kedua berjudul “*Kerjasama Korea Selatan - Indonesia dalam Hubungan Special Strategic Partnership Di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019*” merupakan skripsi yang ditulis oleh Audrey Dylania Muchsya.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan terkait kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia setelah peningkatan hubungan *special*

¹⁴ Audrey Dylania Muchsya, “Kerjasama Korea Selatan-Indonesia Dalam Hubungan Special Strategic Partnership Di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019,” 19 Juli 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56866>.

strategic partnership dalam bidang ekonomi. Peningkatan hubungan menjadi *special strategic partnership* sendiri merupakan realisasi dari kebijakan *New Southern Policy* Korea Selatan di Indonesia. Bentuk kerjasama ekonomi yang dilakukan antara kedua belah pihak pasca peningkatan hubungan diantaranya dalam bidang perdagangan diratifikasinya IK-CEPA pada 2019. Dalam bidang infrastruktur yaitu keikutsertaan Korea Selatan dalam mengembangkan proyek transportasi di Indonesia, meliputi ITS (*Intelligent Transportation System*), kereta api, bandara, dan TOD (*Transit Oriented Development*). Dalam bidang industri kedua belah pihak menyepakati MoU Terkait kerjasama Industri 4.0. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama memaparkan kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia dalam aspek Perdagangan. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah penelitian ini lebih berfokus pada keuntungan dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan.

Tinjauan Pustaka ketiga artikel dengan judul “*Peran Indonesia dalam Kerjasama ASEAN-Korea Selatan Melalui ASEAN-Korea Center*” yang ditulis oleh Windiy Dermawan dan Annisa Rohmaniah.¹⁵ Penelitian ini membahas terkait peran Indonesia sebagai *regional leader*, *active independent*, dan *regional sub-system collaboration* dalam ASEAN-Korea Center. Peran *regional leader* Indonesia dalam ASEAN dinilai dari

¹⁵ Rohmaniah, “PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA ASEAN-KOREA SELATAN MELALUI ASEAN-KOREA CENTRE.”

kesungguhan dalam menyelesaikan konflik di ASEAN, ketersediaan SDM dan SDA yang melimpah, dan Indonesia sebagai pelopor berbagai bentuk kerjasama di ASEAN. Dalam ASEAN-Korea Center Indonesia, berperan aktif dalam berbagai kegiatan seperti, menjadi tuan rumah, inisiator, atau sebagai salah satu negara peserta. Tindakan Indonesia ini menggambarkan peran Indonesia sebagai *active independent* dalam ASEAN-Korea Center. Sebagai negara yang memiliki budaya, ras, dan etnis yang beragam, Indonesia menyambut baik pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea melalui program AKC. Tindakan ini mencerminkan *regional sub-system collaboration* antara Indonesia dan Korea Selatan. Kesamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama menjelaskan terkait keistimewaan Indonesia dalam pandangan Korea Selatan. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan.

Tinjauan Pustaka keempat, artikel berjudul “*Korea’s New Southern Policy Vision and Challenges*” yang ditulis oleh Sungil Kwak.¹⁶ Dikeluarkannya kebijakan *New Southern Policy* memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Korea Selatan. Oleh karenanya pemerintah berusaha memperluas kerjasama tidak hanya berfokus pada *major powers* tetapi juga pada negara ASEAN dan India. Dengan menggandeng ASEAN dan India dapat membantu Korea Selatan

¹⁶ Sungil Kwak, “Korea’s New Southern Policy: Vision and Challenges,” 12 November 2018, <https://think-asia.org/handle/11540/9407>.

dalam mencapai perdamaian di semenanjung Korea. Terdapat beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk memaksimalkan penerapan *New Southern Policy* yaitu, memaksimalkan perkembangan dan pasar MNC Korea Selatan di ASEAN dan India, mempromosikan terkait kebijakan *New Southern Policy* kepada masyarakat Korea Selatan, dan Korea Selatan dapat memaksimalkan kerjasama dengan khususnya dalam bidang ekonomi dengan negara-negara ASEAN secara merata. Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan yakni sama-sama memaparkan terkait realisasi kebijakan NSP di ASEAN. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti akan lebih berfokus pada hasil yang diperoleh Korea Selatan dari Indonesia melalui kebijakan *New Southern Policy*.

Tinjauan pustaka kelima, artikel berjudul “*The New Southern Policy Plus: What’s New and What’s Next?*” yang ditulis oleh Moe Thuzar.¹⁷ Artikel ini menjelaskan terkait penerapan kebijakan NSP pada anggota ASEAN khususnya pada saat pandemi, dengan dibentuknya *New Southern Policy Plus*. Pembaruan kebijakan ini diumumkan oleh Presiden Moon Jae In pada 12 November 2020 bertepatan dengan KTT ASEAN-ROK ke-21. NSP Plus sendiri bertujuan untuk merespon terhadap pemulihan pasca pandemi Covid -19. Oleh karenanya melalui NSP Plus ini Korea Selatan bekerjasama dengan ASEAN dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19. Fokus dari NSP Plus yaitu untuk membantu meningkatkan sistem ekonomi

¹⁷ Moe Thuzar, “The New Southern Policy Plus: What’s New and What’s Next?,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 19 Maret 2021), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3820360>.

dan kesehatan yang lebih baik pasca Pandemi. Dalam realisasinya Korea Selatan mengirimkan bantuan sebesar 5 juta USD untuk peralatan medis pada negara anggota ASEAN. Selain itu Korea Selatan juga meluncurkan proyek sebesar 5 juta USD untuk meningkatkan kapasitas deteksi Covid-19 di ASEAN. Untuk tantangan kedepannya yang akan dihadapi NSP plus dalam pemulihan pasca pandemi bersama negara ASEAN yaitu pemulihan dalam bidang Pendidikan, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan transformasi digital. Namun dengan sifat ASEAN yang beragam tentunya membutuhkan berbagai macam pendekatan untuk mencapai tujuan ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti yaitu sama-sama memaparkan keseriusan dan kekukuhan Korea Selatan dalam menjalankan kebijakan NSP. Sementara perbedaannya adalah peneliti akan memaparkan kepentingan ekonomi dibalik penetapan kebijakan NSP Korea Selatan terhadap Indonesia.

Tinjauan pustaka keenam, artikel berjudul “*Analisis Peran ASEAN dalam Proses Unifikasi Semenanjung Korea*” yang ditulis oleh Alfredo Yowel Antaribaba, dkk.¹⁸ Penelitian ini memaparkan terkait Sejarah dan perkembangan konflik semenanjung Korea, serta peran ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik Berakhirnya perang Korea menyebabkan terpecahnya Korea Selatan dan Korea Utara. Berakhirnya perang tidak menandakan berakhirnya konflik. Konflik diantara keduanya semakin

¹⁸ “Analisis peran ASEAN dalam proses unifikasi Semenanjung Korea | Antaribaba | Gulawentah:Jurnal Studi Sosial,” diakses 16 Januari 2022, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/gulawentah/article/view/9597>.

memanas setelah Korea Utara melakukan proliferasi nuklir dengan sengaja di kawasan Semenanjung Korea. Peningkatan uji coba rudal di Korea Utara semakin memperkeruh hubungan keduanya. Dalam merespon aksi tersebut Korea Selatan melakukan kerjasama militer dan *joint exercise* dengan Amerika Serikat. Selain itu Korea selatan juga menggunakan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) sebagai pertahanan. Tidak hanya itu Korea Selatan juga meminta bantuan kepada Negara-negara ASEAN sebagai tetangga. Di era sebelumnya Korea Selatan cenderung mendorong negara ASEAN untuk menekan dan memberi hukuman kepada Korea Utara, Namun pada masa pemerintahan Moon Jae In negosiasi dan perdamaian. Melalui kebijakan *New Southern Policy*, diharapkan ASEAN mampu membantu Korea Selatan dalam mencapai perdamaian Semenanjung Korea. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menjelaskan latar belakang NSP dikeluarkan. Sementara perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada kepentingan ekonomi Korea Selatan

Tinjauan pustaka ketujuh, artikel berjudul “*Korea’s ‘New Southern Policy’ Towards India: An Analysis*” yang ditulis oleh Ranjit Kumar Dhawan.¹⁹ Dalam penelitian ini Ranjit menganalisis terkait hubungan antara India dan Korea setelah adanya NSP. Setelah berakhirnya perang dingin, India mengeluarkan kebijakan *Look East Policy* dengan tujuan meningkatkan hubungannya dengan negara ASEAN dan Asia Selatan.

¹⁹ Ranjit Kumar Dhawan, “Korea’s ‘New Southern Policy’ Towards India: An Analysis,” *Jadavpur Journal of International Relations* 24, no. 1 (1 Juni 2020): 53–72, <https://doi.org/10.1177/0973598420906248>.

sebagai respon kebijakan tersebut, banyak perusahaan Korea Selatan yang masuk pasar India. Pada tahun 2015 Korea juga meningkatkan hubungan menjadi *special strategic partnership* dengan India. Namun sayangnya dibalik perkembangan ini perdagangan antara India dan Korea Selatan masih terbatas dibandingkan dengan ASEAN.

Dilantiknya presiden Moon pada 2017 semakin memberikan peluang kepada India dalam hubungannya dengan Korea Selatan dengan ditetapkannya kebijakan *New Southern policy*. Setelah NSP ditetapkan, hubungan ekonomi antara keduanya semakin meningkat. Volume perdagangan diantara kedua nya melebihi 20 miliar USD di tahun 2017-2019. Namun dari aspek keamanan hubungan kedua negara belum banyak kemajuan. Partisipasi India dalam masalah denuklirisasi semenanjung Korea juga belum diakui masyarakat Korea Selatan. Terlepas dari hal tersebut, Korea Selatan memiliki kepentingan besar pada India. Berkurangnya minat China pada Perekonomian India, menjadi peluang besar bagi Korea Selatan. India juga menjadi sekutu penting dalam melawan hegemoni China bagi Korea Selatan. Dalam aspek ekonomi, Korea Selatan memandang India sebagai pasar yang potensial untuk produk Korea, Hallyu juga semakin berkembang pesat di India. Dalam aspek militer india dapat menjadi pasar yang sangat potensial bagi persenjataan Korea. Selain itu India juga dapat menjadi pasar energi baru bagi Korea Selatan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memaparkan kepentingan Korea

Selatan terhadap negara tujuan NSP. Yang membedakan peneliti mengambil focus pada bidang ekonomi dan Indonesia.

Tinjauan pustaka kedelapan, skripsi berjudul “*Diplomasi Publik Korea Selatan ke Vietnam, Singapura dan Indonesia*” yang ditulis oleh Tania Gita Sistia.²⁰ Penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya diplomasi Korea Selatan ke Vietnam, Singapura dan Indonesia yaitu untuk merealisasikan kebijakan luar negeri *New Southern Policy* yang digagas oleh Presiden Moon Jae In. Diplomasi publik ini bertujuan untuk mencapai pemahaman masyarakat mengenai Korea Selatan (*Consolidation*) dan untuk mempromosikan kepentingan serta norma yang dimiliki Korea Selatan (*enlargement*). Korea selatan melakukan berbagai macam program untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam Diplomasi Publik terhadap tiga negara tersebut. Di Vietnam Korea Selatan telah melakukan tiga program yaitu, Ho Chi Minh City-Gyeongju World Culture Expo 2017, Korea-Vietnam Food Culture Festival 2018 dan K-Food Festival 2018. Sementara di Singapura Korea Selatan melakukan program yaitu makan siang bersama anggota korps diplomatik dan para pemimpin komunitas Korea di Singapura, K-Performance Night, Korea-Singapore Cultural Exchange Experience 2018, dan KLC-Korean Universities Scholarship Selection Plan 2019. Di indonesia sendiri Korea Selatan melakukan program Arirang TV: Travel Agency, Korean Embassy Meet Young Leader, IKEYP, dan

²⁰ Tania Gita Sistia, “Diplomasi publik Korea Selatan ke Vietnam, Singapura dan Indonesia,” 2019, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10777>.

Program “Sahabat Korea”. Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti peneliti adalah sama-sama memaparkan tentang korea selatan dalam merealisasikan programatau kebijakan. Sementara perbedaannya penelitian yang diteliti peneliti hanya akan memaparkan kepentingan Korea Selatan dari segi ekonomi.

Tinjauan pustaka kesembilan, artikel dengan judul “*Education and South Korea’s New Southern Policy: Locus and Prospects*” yang ditulis oleh Inero Ancho, dkk.²¹ Penelitian ini memaparkan terkait posisi dan peran NSP dalam aspek pendidikan. Peran NSP dalam bidang pendidikan yaitu membantu kemajuan dan kualitas pendidikan negara-negara tujuan NSP, salah satunya dengan cara pertukaran pelajar melalui beasiswa. Selain itu Korea Selatan melalui NSP juga berperan dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan SDM di negara tujuan NSP, dengan cara memberikan beasiswa studi di Korea Selatan, semakin memajukan program yang berhubungan dengan pelatihan pendidikan teknis dan kejuruan, dan memperluas pertukaran antara pakar dan pejabat publik. Kerjasama Pendidikan yang dilakukan Korea Selatan terhadap ASEAN akan mempengaruhi terhadap produktivitas dan kemajuan ekonomi ASEAN. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menjelaskan tujuan dari kebijakan NSP. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan

²¹ Inero Ancho, Kyungeun Kim, dan Saehoon Park, “Education and South Korea’s New Southern Policy: Locus and Prospects,” *Jurnal Studi Pemerintahan* 12, no. 1 (18 Februari 2021): 62–75.

menjabarkan kepentingan dan keuntungan ekonomi yang didapatkan Korea Selatan dari Indonesia melalui NSP.

Tinjauan Pustaka kesepuluh, skripsi berjudul “Analisis Peran *Middle Power* Korea Selatan Terhadap ASEAN melalui *New Southern Policy*” merupakan skripsi yang ditulis oleh Retnaningtyas Puspitasari.²² Skripsi ini menjelaskan terkait peran Korea Selatan sebagai negara *middle power* melalui penerapan kebijakan NSP di ASEAN. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan peran Korea Selatan sebagai *assembler* di ASEAN melalui kebijakan NSP. Terdapat lima sifat *assembler* yang telah dipenuhi Korea Selatan yaitu menciptakan kepercayaan antar negara anggota sebelum membentuk institusi kerjasama Kawasan, mendirikan institusi kerjasama, ikut berperan dalam kerjasama multilateral berdasarkan kepentingan regional, penyelesaian konflik antara anggota Kawasan menggunakan ketentuan institusi dan membangun prinsip non-intervensi antar negara anggota, terakhir mendukung terbentuknya kerjasama sebagai jalan untuk mendapatkan tujuan bersama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menjelaskan terkait tujuan Korea Selatan dalam kebijakan NSP. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan secara menyeluruh terkait peran *middle power* Korea Selatan di ASEAN, sementara peneliti hanya akan berfokus pada Indonesia saja.

²² Retnaningtyas Puspitasari, “Analisis Peran *Middle Power* Korea Selatan Terhadap Asean Melalui *New Southern Policy*,” 2021, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/84486/Analisis-Peran-Middle-Power-Korea-Selatan-Terhadap-Asean-Melalui-New-Southern-Policy>.

Tinjauan Pustaka terakhir yaitu skripsi dengan judul “Peluang Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam *New Southern Policy* Korea Selatan” yang ditulis oleh Annisa Prasasti Ramadhaningtyas.²³ Penelitian ini menjelaskan terkait peluang-peluang diplomasi ekonomi yang bisa didapatkan Indonesia terhadap Korea Selatan melalui kebijakan NSP. Penelitian ini juga didukung dengan cara analisis SWOT terhadap kondisi internal dan eksternal. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti yaitu dalam menjelaskan hubungan perdagangan setelah kebijakan NSP. Sedangkan perbedaannya yaitu dari objek penelitian, penelitian ini mengambil fokus pada peluang Indonesia terhadap NSP, sementara penelitian yang dilakukan peneliti lebih berfokus pada kepentingan Korea Selatan melalui NSP terhadap Indonesia.

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Kepentingan Korea Selatan melalui kebijakan NSP di Indonesia. Sementara penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada ASEAN atau membahas kebijakan NSP dalam lingkup Korea Selatan sendiri. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan konsep *national interest* dan Interdependensi.

²³ PRASASTI RAMADHANINGTYAS ANNISA, “PELUANG DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM NEW SOUTHERN POLICY KOREA SELATAN” (skripsi, Universitas Mataram, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/16936/>.

F. Argumentasi Utama

Kebijakan *New Southern Policy* merupakan kebijakan yang digagas oleh Presiden Moon Jae In dengan tujuan meningkatkan hubungan diplomatik Korea Selatan dengan negara ASEAN dan India. Kebijakan *New Southern Policy* sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memperluas pasar produk Korea Selatan melalui FTA (*Free Trade Area*) dengan negara-negara tujuan NSP. Di Indonesia sendiri Korea Selatan menyepakati IK-CEPA. Disamping itu melalui kebijakan NSP Korea Selatan ingin memudahkan perusahaan Korea Selatan untuk berinvestasi di negara tujuan NSP khususnya Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul “Kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui Kebijakan *New Southern Policy*” akan dijabarkan dalam lima bab. Pada setiap bab yang tersedia akan dikembangkan menjadi beberapa sub bab yang disusun dengan sistematis, dengan tujuan dapat memberikan uraian secara jelas terhadap hasil dan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian awal dari penelitian yang berisi tentang rencana awal penelitian. Bab ini memiliki beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, argumentasi utama, dan sistematika pembahasan. Dimana masing masing sub bab ini

memiliki fungsinya masing-masing. Latar belakang berisi tentang gambaran awal terkait isu dan permasalahan yang akan diteliti. Setelah mengetahui permasalahan penelitian, permasalahan tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk rumusan masalah. Selanjutnya peneliti kemudian memaparkan tujuan penelitian, yang berisi tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Kemudian peneliti memaparkan manfaat penelitian. Dilanjutkan dengan kajian pustaka, kajian pustaka ini berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan. Definisi konseptual sendiri menjelaskan tentang konsep yang tidak mudah dipahami dari judul penelitian. Setelah itu terdapat argumentasi utama yang merupakan gagasan penguat dalam penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan yang memaparkan gambaran dari penelitian yang mencakup lima bab.

BAB II: LANDASAN TEORI

Landasan teori ini berisi tentang kajian teori maupun konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian, dengan tujuan dapat memecahkan pertanyaan masalah penelitian yang sudah digagas sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan konsep *national interest* dan interdependensi.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis metode yang digunakan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang akan dijabarkan dalam beberapa sub bab yaitu, pendekatan dan jenis penelitian, tahap-tahap penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, kemudian yang terakhir Teknik pengujian keabsahan data.

BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA

Pada bab ini peneliti akan memaparkan penyajian data dan analisis data tentang kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan New Southern Policy . Data yang telah diperoleh kemudian akan dipaparkan dalam bentuk tulisan dan data pendukung lainnya seperti grafik, tabel, gambar dan lain sebagainya. Hasil dari temuan penelitian yang telah didapatkan kemudian akan dituangkan dalam bentuk sub-bab secara sistematis. Kemudian peneliti melakukan Analisa data dengan cara mengkorelasikan data dan teori yang digunakan oleh peneliti, peneliti menggunakan konsep *national interest* dan Interdependensi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir sekaligus bab penutup dalam penelitian. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait hasil akhir yang telah ditemukan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan

penjelasan singkat terkait penelitian dan hasilnya, sementara saran merupakan masukan pemikiran dari peneliti yang bertujuan untuk memberikan solusi dan manfaat bagi para pembaca.



BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Definisi Konseptual

Berdasarkan judul penelitian “Kepentingan Korea Selatan Terhadap Indonesia Melalui Kebijakan New Southern Policy ” terdapat tiga konsep yang maknanya jarang diketahui masyarakat secara meluas yaitu, kepentingan, kebijakan, dan *New Southern Policy*. Oleh karenanya dua konsep ini akan dijelaskan lebih mendalam sehingga masyarakat atau pembaca dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya.

1. Kepentingan

Dalam konteks ini kepentingan yang dimaksud merujuk pada kepentingan suatu negara yaitu Korea Selatan, yang mana dalam konteks Hubungan Internasional lebih dikenal dengan kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional didefinisikan sebagai tujuan dan ambisi yang ingin dicapai negara dalam beberapa aspek yaitu ekonomi, militer, dan budaya. Pendapat lain juga mendefinisikan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam berinteraksi dengan aktor internasional.²⁴ Dalam perumusan kebijakan luar negeri kepentingan nasional memiliki peran yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri suatu negara akan selalu berpedoman dan sejalan dengan kepentingan nasional negara

²⁴ Puji Ningsih, “BAB II LANDASAN TEORI A. Potensi Ancaman,” diakses 30 Maret 2022, https://www.academia.edu/15796155/BAB_II_LANDASAN_TEORI_A_Potensi_Ancaman.

tersebut. Terdapat dua aspek penting yang dibutuhkan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional yaitu kebijakan dan kekuatan. Dimana kebijakan berfungsi sebagai alat untuk mencapai kepentingan, dan kekuatan berfungsi sebagai modal untuk mencapai kepentingan.²⁵

2. *New Southern Policy*

New Southern Policy (NSP) merupakan kebijakan luar negeri Korea Selatan yang dirumuskan pada masa pemerintahan Moon Jae In. presiden Moon Jae In mengatakan NSP merupakan kebijakan baru ke arah selatan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara ASEAN dan India ke level yang lebih tinggi. Melalui NSP Korea Selatan ingin menjadikan negara ASEAN dan India sebagai mitra diplomatik prioritas dengan tujuan untuk menyeimbangkan kembali hubungan diplomatik dengan negara-negara middle power.²⁶ Seperti yang diketahui korea selatan pada kepemimpinan sebelumnya Korea Selatan selalu menjadikan 4 negara major powers sebagai mitra utama dalam kerjasama.

Kebijakan NSP memiliki tiga kebijakan inti yaitu diversifikasi ekonomi, keseimbangan diplomatik, serta koperasi regional. Kebijakan inti tersebut meliputi pilar pembangunan manusia, kesejahteraan, dan perdamaian.²⁷

²⁵ Ibid

²⁶ antaranews.com, "Menengok 'New Southern Policy' Korea Selatan," Antara News, 12 April 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2095826/menengok-new-southern-policy-korea-selatan>.

²⁷ "Hyundai, Naver, dan New Southern Policy Korea Selatan - Ekonomi Bisnis.com," diakses 30 Maret 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210430/9/1388775/hyundai-naver-dan-new-southern-policy-korea-selatan>.

Dasar pemikiran Presiden Moon Jae In dalam penetapan kebijakan NSP yaitu, pertama, negara ASEAN merupakan salah satu titik kawasan pertumbuhan politik, ekonomi, dan budaya, kedua, penurunan ekonomi China sebagai partner dagang utama Korea Selatan dan adanya perang dagang antara US dan China menjadikan Korea Selatan mencari pasar lain sebagai alternatif, ketiga semakin meningkatnya hubungan *people to people* antara Korea Selatan dan negara ASEAN.²⁸

B. Kerangka Konseptual

1. National Interest

Kepentingan nasional merupakan suatu dasar dari ditetapkannya kebijakan luar negeri. Freden berpendapat bahwa kepentingan nasional didominasi dan ditentukan oleh kepentingan kelompok-kelompok di suatu negara. Kelompok-kelompok tersebut berupa partai politik dan birokrasi yang kemudian berinteraksi dan menghasilkan suatu kepentingan nasional. Nuechterlein juga menjelaskan, terdapat empat aspek kepentingan nasional, yaitu masalah pertahanan, ekonomi, keamanan dunia, dan ideologi.

H.J Morgenthau mendefinisikan bahwa kepentingan nasional merupakan seperangkat tujuan yang dimiliki negara dengan tujuan memaksimalkan potensi negara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional bersifat fleksibel dan

²⁸ Adrini Pujayanti, POTENSI DAN TANTANGAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-KOREA SELATAN, bidang hubungan internasional info singkat Vol.XI, No. 23, Desember 2019.

dirumuskan secara rasional. Dengan dirumuskan secara rasional, kepentingan nasional kemudian memiliki sifat seperti hukum sehingga negara harus mematuhi dalam bentuk kewajiban. Kewajiban tersebut diantaranya berupa politik, perlindungan identitas fisik, dan budaya yang dimiliki negara dari gangguan negara lain.²⁹ Sedangkan sifat kepentingan nasional yang fleksibel, menjadikan kepentingan nasional dapat berubah dan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan rakyat pada saat itu.³⁰

Pada masa peperangan seperti perang dunia, perang dingin, dan sebagainya, memandang bahwa kepentingan nasional berkaitan erat dengan *power* negara sebagai pedoman maupun tujuan, khususnya yang bersifat destruktif (*hard power*). Apabila kepentingan nasional ditujukan untuk mengejar *power* dan *power* digunakan sebagai alat untuk mengejar kepentingan nasional, sehingga menyebabkan munculnya system anarki, seperti konflik, perang, dan perebutan kekuasaan.³¹

Namun setelah periode perang berakhir, muncul aktor baru dalam hubungan internasional, yaitu *non state actor* seperti individu dan kelompok (meliputi komunitas dan institusi swasta). Sehingga kepentingan negara yang awalnya bersifat egois dan agresif berubah menjadi individualis sekaligus altruistic dan persuasif yang bersifat non destruktif (*soft power*).

²⁹ Hans. J Morgenthau, "Another Great Debate. The National Interest of the United States," (The American Political Science Review XLVI, 1952), 972

³⁰ Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations 4 th edition, (New York: Alfred A. Knopf, 196), 8-9.

³¹ Arry Bainus dan Junita Budi Rachman, "Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (31 Mei 2018): 109, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>.

Hal ini kemudian memunculkan soft power diplomasi, yang memunculkan beragam diplomasi yang mengaitkan dan menyertakan publik dan individu di dalamnya.³²

Scott Burchill dalam bukunya yang berjudul *The National Interest in International Theory* menjelaskan dalam pandangan liberalisme konsep tentang kepentingan nasional memiliki pengaruh besar pada kaum liberal yang percaya bahwa bukan hanya motivasi individu untuk keuntungan pribadi tetapi kepentingan nasional juga menjadi dasar dimana perdamaian global dapat dibangun. Jika rasa serakah pada manusia tidak dicampuri oleh pemerintah, sebuah kebijakan perdagangan bebas internasional akan mengakhiri konflik dan perang antara negara. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional dapat menjadi jalan untuk menciptakan perdamaian.³³ Dalam hal ini pandangan liberalisme meyakini bahwa melalui kebijakan perdagangan bebas dapat menciptakan perdamaian dan mengakhiri konflik antar negara.

Perdagangan bebas dipandang sebagai cara yang lebih damai untuk mencapai kesejahteraan nasional karena, melalui perdagangan bebas ekonomi suatu negara akan lebih baik secara materi daripada jika mengejar nasionalisme dan autarki. Disamping itu, perdagangan bebas juga akan meruntuhkan kecurigaan dan perpecahan antar negara dan dapat menyatukan individu dalam satu komunitas. Perdagangan bebas akan

³² Eufonius Suwarman dkk., "RIVALITAS GEOPOLITIK AMERIKA SERIKAT â€“ TIONGKOK DI MYANMAR," diakses 30 Maret 2022, <https://core.ac.uk/display/236430268>.

³³ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory*, (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005), 118

memperluas jangkauan kontak dan tingkat pemahaman antara bangsa-bangsa di dunia dan mendorong persahabatan internasional.³⁴ Oleh karena itu kepentingan nasional menurut liberalisme harus menghasilkan penghapusan hambatan ekonomi nasional, salah satu caranya melalui perdagangan bebas.³⁵

Selain pasar bebas, salah satu aspek yang juga dikaitkan dengan kepentingan nasional menurut liberalisme adalah investasi. Dalam buku Burchill disebutkan bahwa hubungan antara kemakmuran ekonomi suatu negara dan pasar modal dunia sangat menentukan pada kepentingan nasional. Karena sebagian besar negara tidak mampu menghasilkan kekayaan endogen yang cukup untuk membiayai pembangunan ekonominya, pemerintah perlu menyediakan kondisi ekonomi domestik yang akan menarik investasi asing ke negaranya. Dalam hal ini, pemerintah memainkan peran penting dalam membuka jalan bagi modal asing. pemerintah harus menawarkan iklim investasi yang paling menarik kepada yang relatif langka. Hal ini memberikan komunitas investasi asing pengaruh yang signifikan atas pengaturan kebijakan dan jalannya pembangunan ekonomi suatu negara secara umum, dan merupakan pengurangan kedaulatan ekonomi negara dan kontrol yang menentukan atas kepentingan nasional.³⁶

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid, 119

³⁶ Ibid, 146

Dari penjabaran diatas dapat ditarik benang merah bahwa kepentingan nasional menurut liberalisme dalam buku Scott Burchill adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi melalui perdagangan bebas dan investasi yang semakin terbuka antar negara. Dengan semakin terbukanya perdagangan bebas dan investasi maka mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat dengan tenang dan mudah melakukan aktivitas ekonomi.

Penelitian ini akan menggunakan cara pandang Liberalisme Scott Burchill dalam buku *The National Interest in International Theory* untuk mengetahui kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan *New Southern Policy*. Hal ini dikarenakan peneliti akan memfokuskan penelitian pada kepentingan ekonomi, sehingga pemikiran Burchill sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul “Kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui Kebijakan New Southern Policy ” menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami realitas sosial, sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara melihat atau mengamati dunia secara apa adanya, bukan dunia yang seharusnya. Oleh karena itu seorang peneliti kualitatif harus memiliki sifat *open minded*. Metode penelitian kualitatif juga disebut metode penelitian naturalistic karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*).³⁷

Pengertian lain menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau metode lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sehingga penelitian ini cocok digunakan untuk melakukan penelitian sosial di masyarakat.³⁸ Dari pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami keadaan sosial secara nyata dengan hasil penelitian merupakan penjabaran dari suatu fenomena yang bukan berupa angka.

³⁷ Dr Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Zifatama Jawara, t.t.), 3.

³⁸ I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

Sementara jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif umumnya dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui fenomena atau keadaan objek subjek penelitian secara rinci.³⁹ Secara sederhana penelitian deskriptif biasanya dilakukan untuk menjelaskan atau menggambarkan objek penelitian secara rinci dan mendalam .

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti akan mengumpulkan data sekunder untuk menjelaskan hasil penelitian. Dalam penelitian sendiri terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari objek penelitian. Data tersebut bisa berupa wawancara, dokumen dan informasi dari website resmi pemerintah. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa Korea Selatan bernama HanHae Hong, Mahasiswa Korea Selatan di Khazar University and Research in Eurasian. Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak didapatkan dari objek penelitian secara langsung. Data sekunder ini bisa diperoleh dari buku, tesis, skripsi, jurnal, berita, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian peneliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan judul “Kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan *New Southern Policy*” dilakukan dengan studi

³⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Prenada Media, 2015), 18.

Pustaka, sehingga penelitian akan berlokasi di perpustakaan, serta tempat dan sumber lain yang dapat mendukung perolehan data dalam penelitian. Peneliti juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan salah satu mahasiswa Korea Selatan bernama HanHae Hong, Mahasiswa Korea Selatan di Khazar University and Research in Eurasian. Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu delapan bulan terhitung sejak proposal skripsi ini disetujui.

C. Tahap-Tahap Penelitian

Suatu penelitian ilmiah membutuhkan tahap-tahap penelitian yang terstruktur dan sistematis. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan berfokus pada masalah yang diteliti, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian. Penelitian ini mengikuti panduan tahapan dari Suryana “Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”.⁴⁰ Tahap-tahap penelitian tersebut diantaranya:

a) Menentukan Tema dan Permasalahan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih tema Kajian Politik Luar Negeri yang berkaitan dengan Studi Kawasan Asia-Pasifik dengan tingkat analisa Negara. peneliti memilih meneliti kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui Kebijakan *New Southern Policy* karena peneliti tertarik untuk mengetahui apa kepentingan dan

⁴⁰ Suci Millati Qurrota A'yuni, “Analisa Open Door Policy Turki Terhadap Krisis Kemanusiaan Pengungsi Suriah Tahun 2011-2019” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/38950/>.

alasan dibalik Korea Selatan menetapkan kebijakan NSP dan menjadikan Indonesia sebagai salah negara satu fokus utamanya.

b) Melakukan Pendalaman Studi Literatur

Untuk memperkuat pemahaman terkait fenomena yang diteliti, maka peneliti mengumpulkan studi literatur dari berbagai sumber. Sumber tersebut berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan lain sebagainya. Pengumpulan informasi tersebut bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara teliti. Dibutuhkan sikap selektif dari peneliti saat mengumpulkan studi literatur hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi data yang aktual dan terpercaya.

c) Mengidentifikasi Rumusan Masalah

Mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian merupakan hal yang penting, karena mengidentifikasi masalah merupakan tahap awal dari suatu penelitian. Dari masalah tersebut kemudian peneliti dapat melakukan sebuah penelitian. Permasalahan dapat terjadi apabila terdapat kesenjangan (*gap*) antara *des sollen* dan *das sein*, yaitu perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada pada faktanya, perbedaan antara apa yang dibutuhkan dan apa yang tersedia, dan perbedaan antara harapan dan kenyataan.⁴¹ Kesenjangan dalam penelitian ini terdapat pada dipilihnya Indonesia sebagai negara fokus utama kebijakan NSP. Seperti yang diketahui Indonesia termasuk dalam negara *middle power* yang sangat berbeda

⁴¹ Ibid.

latar belakangnya dengan negara inti partner kerjasama Korea Selatan yaitu US, China, Jepang, dan Rusia.

d) Menyusun Kerangka Pemikiran

Pada tahap ini, peneliti diharuskan menggunakan teori atau konsep berdasarkan bidang pengetahuan yang relevan dengan topik yang dikaji, dengan tujuan penelitian yang dilakukan memiliki konstruksi atau kerangka pikir yang logis. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui kepentingan korea selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan NSP dan alasan dibalik penetapan kebijakan NSP, yang menggunakan konsep *national interest* dan interdependensi.

e) Mengumpulkan dan Mengolah Data

Dalam pengumpulan data, peneliti hanya memilih data actual sebagai sumber referensi. Mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber terpercaya sangat penting dilakukan peneliti untuk menunjang penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder yang selanjutnya diolah menjadi klasifikasi-klasifikasi data. Data yang diklasifikasikan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.

f) Melakukan Analisa Data

Ketika melakukan Analisa data, peneliti dapat menarik pemahaman dari data yang telah diperoleh. Sehingga rumusan masalah dapat terjawab melalui hipotesis yang telah diperoleh dari pengumpulan dan analisa data selama penelitian.

g) Membuat Kesimpulan dan Laporan Penelitian

Tahap akhir dari sebuah penelitian yaitu membuat kesimpulan dan laporan. Kesimpulan diperoleh dari pembahasan yang sudah ditulis sebelumnya, selanjutnya peneliti menulis hasil penelitiannya dalam bentuk laporan penelitian. Laporan penelitian penting untuk dibuat oleh peneliti untuk kepentingan publikasi.

D. Tingkat Analisa Data

Dalam suatu penelitian tingkat Analisa memiliki peran penting, hal ini bertujuan agar peneliti dapat memfokuskan pada ruang lingkup yang dipilih dan terhindar dari kesalahan metodologis. Mohtar Mas'ood membagi tingkat Analisa menjadi lima bagian, diantaranya:⁴²

a) Perilaku individu

Pada level ini ilmuwan memiliki asumsi bahwa interaksi antar individu yang terjadi dalam suatu negara merupakan faktor penting dalam fenomena Hubungan Internasional. maka dari itu, untuk memahami Hubungan Internasional para ilmuwan dan peneliti wajib untuk mengkaji sikap aktor utama yang berperan dan berhubungan dalam pengambilan suatu kebijakan, seperti Presiden, Perdana Menteri, dan aktor lainnya,

b) Perilaku kelompok

⁴² Mohtar mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, pertama(Jakarta:LP3ES, 1990), 46.

Level ini menjelaskan bahwa peristiwa Hubungan Internasional dapat terjadi karena adanya interaksi antar kelompok kecil dari berbagai negara. kelompok kecil yang dimaksudkan disini adalah kabinet, dewan penasihat keamanan, dan sebagainya.

c) Negara-Bangsa

Pada dasarnya, perilaku negara bangsa mendominasi tindakan dalam Hubungan Internasional. Sehingga perilaku maupun interaksi politik suatu kelompok maupun individu hanya akan ditinjau jika tingkat analisisnya berkaitan dengan tindakan internasional negara yang bersangkutan.

d) Pengelompokan negara-negara

Para analis berasumsi bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh negara seringkali dipengaruhi oleh interaksi antar negara bangsa di dunia, yang mengambil keputusan didasari oleh kesepakatan kelompok. kelompok yang dimaksud disini berupa perkelompokan negara secara wilayah, aliansi dan lainnya.

e) System internasional

Level ini berpendapat bahwa interaksi antar negara secara internasional membentuk suatu sistem. System ini kemudian berbentuk lingkungan yang yang berpengaruh terhadap perilaku negara bangsa.

Berdasarkan dari kelima tingkat Analisa diatas, penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan New Southern Policy ” menggunakan tingkat Analisa ketiga, yaitu negara bangsa. Hal ini dikarenakan peneliti akan lebih fokus mengkaji terkait interaksi antara Korea Selatan dan Indonesia pasca penetapan kebijakan NSP, dan kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia melalui kebijakan NSP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ketersediaan dan kekayaan data sangat menunjang terhadap proses dan hasil penelitian. Semakin banyak dan lengkap data yang dikumpulkan maka penelitian tersebut akan menjadi semakin kredibel. Pengumpulan data sendiri merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan standar untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Sementara data sendiri didefinisikan sebagai bahan informasi terkait objek penelitian yang didapatkan di lokasi penelitian.⁴³

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa wawancara, studi pustaka, dan data online. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari literatur, seperti buku, jurnal internasional maupun nasional, artikel, website resmi pemerintah Korea Selatan dan Indonesia, dan dokumen lain yang dapat menunjang dan berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan peneliti. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data yang bersumber dari data skunder yang berupa

⁴³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Zifatama Jawara, t.t.), 103.

wawancara yang akan dilakukan dengan mahasiswa Korea Selatan HanHae Hong Khazar University and Research in Eurasian.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses penyusunan data yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan hipotesa sebagai jawaban penelitian. Analisis data bertujuan untuk memahami apa makna dibalik semua data yang dikumpulkan, dengan cara mengklasifikasi dan merangkainya menjadi sesuatu yang kompak dan mudah dipahami, serta menemukan pola umum yang muncul dari data tersebut.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan Teknik analisa yang mengacu pada model Analisa interaktif yang dikemukakan oleh Mathew B. Miles dan Michael Huberman. Terdapat tiga aliran aktivitas analisis data yang dilakukan bersamaan, yaitu:⁴⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi terhadap data yang diperlukan dan tidak diperlukan oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan data yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Data yang telah dipilih kemudian diklasifikasi, di organisir, serta dibuat abstrak dan transformasi data mentah untuk diolah lebih lanjut oleh peneliti.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

⁴⁴ Amanca Pamalina Lapasa, “Analisis Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Dalam Merespon Perang Harga Minyak Terhadap Rusia Pada Tahun 2020” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/49304/>.

⁴⁵ Ibid.

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian kumpulan data yang sudah diorganisir rapi, sehingga data dapat diproses dan diolah untuk menghasilkan analisa yang valid dan aktual. Selain itu, di tahap ini peneliti juga melakukan kombinasi berbagai data yang sudah diseleksi dengan tujuan menemukan interpretasi makna terhadap fenomena yang dikaji. Pada penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk uraian teks narasi. Data yang disajikan secara selektif dapat mendukung diperolehnya analisa data yang baik.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing And Verification)

Setelah semua data dikumpulkan, direduksi, dan dianalisis, peneliti kemudian harus membuat suatu kesimpulan dari penelitiannya. Pada bagian ini dilakukan “pengujian kebenaran” dari analisis data yang bersumber dari data yang telah diperoleh sebelumnya oleh peneliti, dengan tujuan untuk memastikan keakuratan data dan menghindari adanya kesalahan dalam penelitian. Setelah melakukan validasi data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian ilmiah pengujian keabsahan data sangat penting dan tidak dapat ditinggalkan. Dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data bertujuan untuk menggali kebenaran secara objektif dan

kredibel. Terdapat empat Teknik pengujian keabsahan data kualitatif menurut Sugiono, yaitu kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik kredibilitas. Uji kredibilitas dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber, dan kecukupan referensi.

Perpanjangan pengamatan dilakukan melalui pencarian data dengan studi pustaka secara rinci. Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperkaya informasi dan menguji keabsahan data yang sudah diperoleh dari studi Pustaka. Triangulasi sumber dilakukan melalui pencocokan data dari berbagai sumber, yaitu situs web resmi, artikel ilmiah, dan hasil wawancara. Sedangkan kecukupan referensi dilakukan melalui pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya tentang referensi yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dan Korea Selatan

1. Masa Orde Lama

Hubungan Korea Selatan dan Indonesia diawali dari pengakuan Korea Selatan terhadap Indonesia sebagai suatu negara pada bulan desember 1949. Namun pada masa Orde lama, dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno hubungan Korea Selatan dan Indonesia tidak memiliki perkembangan yang baik. Hal ini dikarenakan ideologi yang bertolak belakang antara kedua negara pasca Perang Dunia II. Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Rhee Syngman lebih berpihak pada blok barat dan menyatakan anti terhadap Komunisme. Sementara Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno lebih berpihak pada blok timur atau blok kapitalisme.⁴⁶

Namun setelah masa pergantian kepemimpinan di Korea Selatan, yang kemudian dipegang oleh Presiden Park Chung Hee Korea Selatan mulai menciptakan hubungan lebih dekat dengan Indonesia dengan rencana menjalin hubungan kenegaraan secara resmi. Keinginan ini dibuktikan dengan adanya pertemuan singkat antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Korea Selatan pada saat itu Kim Jong Pil. Pada pertemuan tersebut Kim Jong Pil menyampaikan bahwa sifat pemerintahan Korea Selatan saat

⁴⁶ Belita Ayu Silviana Wibisono, “PENURUNAN PERDAGANGAN BILATERAL INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM KERJASAMA WORKING LEVEL TASK FORCE MEETING (WLTFM)” 5 (t.t.): 14.

ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dan menganjurkan Indonesia untuk membuka hubungan kenegaraan secara resmi dengan Korea Selatan. Merespon hal tersebut pemerintah Indonesia menyetujui dan membuka hubungan tingkat Konsuler dengan Korea Selatan. Pada bulan Mei 1966 dilakukan penandatanganan sebagai tanda dimulainya hubungan tingkat konsuler antara Korea Selatan dan Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1966 kantor Konsulat Jenderal Republik Korea Selatan di buka secara resmi di Jakarta.⁴⁷

2. Masa Orde Baru

Melanjutkan kepemimpinan Presiden Soekarno, pada masa pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto Indonesia membuka Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Seoul pada 1 Juni 1968. Perkembangan besar hubungan Korea Selatan dan Indonesia mulai terjadi tahun 1980 saat diadakannya KTT. Di tahun tersebut Presiden Korea Selatan Jeon Doo Hwan untuk pertama kalinya mengunjungi Indonesia dengan tujuan mempertegas posisi Korea Selatan di bagian negara-negara non blok. Kemudian pada tahun 1982, Presiden Soeharto untuk pertama kalinya mengunjungi Korea Selatan, dengan tujuan mengembangkan hubungan bilateral dan memperluas kerjasama, khususnya dari aspek perdagangan.⁴⁸

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Cyril, Presiden Soeharto dari Hawaii Langsung Menuju Korea, HM Soeharto, 06 Juni 2017, tersedia di <http://soeharto.co/presiden-soeharto-dari-hawaii-langsung-menuju-korea/>; diakses pada 12 April 2019.

Dari aspek ekonomi pada tahun 1980 hubungan Korea Selatan dan Indonesia semakin berkembang pesat. Korea Selatan yang membutuhkan pasar dan lemah akan sumber daya alam menjadikan negara-negara ASEAN sebagai tujuan kerjasama. Ketersediaan sumber daya alam minyak bumi, gas, dan tenaga kerja yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat potensial untuk membantu Korea Selatan dalam factor ekonomi. Pada akhir tahun 1980 hubungan dan kerjasama Korea Selatan dan Indonesia dalam AFTA semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Jumlah ekspor Korea ke Indonesia yang mencapai 402,1 juta dolar, kemudian meningkat delapan kali lipat, menjadi 3.198 juta dolar. Sementara impor Indonesia ke Korea Selatan pada tahun 1988 mencapai 905,2 juta dolar, dan pada tahun 1996 meningkat menjadi 4.013 juta dolar. Melebihi nilai ekspor Korea ke Indonesia.⁴⁹

3. Masa Reformasi

Dibawah kepemimpinan B.J Habibie tidak banyak perkembangan dalam hubungan Korea Selatan dan Indonesia hal ini dikarenakan B.J Habibie memfokuskan pada perbaikan masalah internal negara dan masa pemerintahan yang singkat. Pada Pemerintahan Abdurrahman Wahid yang kerap disapa Gus Dur. Gus Dur melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada bulan Februari 2000. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperluas Kerjasama ekonomi, pengembangan bisnis otomotif, dan memperkuat

⁴⁹ Young Kyu Jeong, "Kerjasama Ekonomi Korea Selatan Dan Indonesia Di Masa Kini Dan Masa Depan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 4, no. 1 (1 Juli 2003): 103–28, <https://doi.org/10.21002/jepi.v4i1.135>.

hubungan kedua negara.⁵⁰ Kemudian pada 28 November 2000 Presiden Kim Dae Jung mengunjungi Indonesia menemui Presiden Gus Dur. Dalam kunjungan tersebut kedua belah pihak membahas terkait ekspor-impor, investasi dan kerjasama regional antara Indonesia dan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan juga menyampaikan dukungannya terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia. Selain itu Presiden Kim juga berterimakasih kepada Presiden Gus Dur atas dukungannya terhadap unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara secara damai.⁵¹

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Korea Selatan sedang gencar menggagas reunifikasi Semenanjung Korea. Sementara dilihat dari latar belakang personal Presiden Megawati, Presiden Megawati merupakan salah satu tokoh yang dapat membantu dalam keberhasilan reunifikasi kedua negara tersebut. Hal ini dikarenakan beliau merupakan anak dari Presiden pertama yaitu Soekarno yang merupakan sahabat dekat dari pemimpin pertama Korea Utara Kim Il Sung. Oleh karenanya pada masa Megawati menjabat beliau mengusahakan dialog antara kedua negara.

Pada 28 Maret 2002 Presiden Megawati mengunjungi Korea Utara selama tiga hari. Kunjungan tersebut salah satunya bertujuan untuk menyampaikan pesan Presiden Korea Selatan untuk memulai ladi dialog

⁵⁰ “Koleksi Citra - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia,” diakses 1 Agustus 2022, https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/photo/?box=detail&id=89&from_box=list_245&hlm=2&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=3&presiden=gusdur.

⁵¹ 012030315 Sita Resmi, “PERANAN ASIA-EUROPE MEETING (ASEM) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA KE UNI EROPA” (other, PERPUSTAKAAN, 2018), <http://repository.unpas.ac.id/35635/>.

dengan Korea Selatan dan Amerika.⁵² Kemudian megawati melanjutkan mengunjungi Korea Selatan pada 30 Maret 2002. Dalam kunjungan tersebut Megawati menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Korea Utara kepada Kim Dae Jung. Megawati menyampaikan bahwa Kim Jong Il menyambut baik terhadap rencana dialog yang ditawarkan Korea Selatan, dan Kim Jong Il menunggu tanggapan dari pihak Korea Selatan.⁵³

Sementara terkait kerjasama dengan Indonesia Kim Dae Jung menyampaikan upaya Korea Selatan membantu Indonesia dalam penyelesaian krisis ekonomi. Presiden Kim Dae Jung juga meminta Indonesia untuk memberikan stabilitas keamanan dan iklim yang sejuk agar Investor atau pengusaha Korea Selatan mau berinvestasi di tanah air. Tidak hanya itu kementerian luar negeri kedua negara menandatangani traktat ekstradisi untuk pelaku kriminalitas. Selain itu kedua menteri luar negeri juga menekan kerjasama dalam aspek energi dan sumberdaya mineral, dengan tujuan agar sumber energi kedua negara dapat bermanfaat untuk kemakmuran rakyat kedua negara.⁵⁴

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap disapa SBY hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia mengalami dobrakan yang cukup besar melalui kunjungan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun ke Indonesia pada Desember 2006 yang bertujuan

⁵² “Megawati mengunjungi Korea Utara - 2002-03-28,” VOA Indonesia, diakses 1 Agustus 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2002-03-28-2-1-85145162/20835.html>.

⁵³ “Megawati Bertemu Kim Dae Jung - News Liputan6.com,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/31624/megawati-bertemu-kim-dae-jung>.

⁵⁴ Ibid.

menandatangani *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* di Jakarta. Terdapat tiga bentuk kerjasama yang dihasilkan dari perjanjian tersebut diantaranya, pertama, kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dengan tujuan membangun stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia. Kedua, kerjasama dalam bidang sosial budaya dengan tujuan promosi dan pengenalan terhadap budaya dan pariwisata unggulan yang dimiliki kedua negara. Ketiga, kerjasama ekonomi, yang meliputi perdagangan dan investasi, dengan tujuan dapat memajukan ekonomi dan menghindari krisis di kedua negara.⁵⁵

Merespon kunjungan Presiden Korea Selatan, Presiden SBY pada juli 2007 melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dengan tujuan membahas lebih lanjut terkait *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea* yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut Presiden SBY juga akan menyaksikan penandatanganan 14 MoU antara pihak Korea Selatan dan Indonesia, yang meliputi bidang infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan energi. Kesepakatan nilai kontrak antara keduanya mencapai 8,5 Miliar USD atau 85 triliun rupiah. Selain itu kedua belah pihak juga akan membahas terkait dibentuknya

⁵⁵ Bobby Bella Alamsyah, "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU 2010-2015" 5 (t.t.): 16.

Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC) pada tanggal 30 April 2007.⁵⁶

Kemudian pada 25 Maret 2010 dilakukan pertemuan JTF-EC ke-2 di Seoul Korea Selatan. Dimana dalam pertemuan tersebut kedua negara menandatangani *MoU Business Agreement on the Research Project to Assess Indonesian Shipbuilding Industry and Recommend Changes for Improvement* dan MoU terkait Kerjasama Standarisasi antara Badan Standarisasi Nasional kedua belah pihak. Penandatanganan kedua MoU ini disaksikan langsung oleh Menteri kedua negara.⁵⁷

Setahun setelahnya pada 18 Mei 2011 Pemerintah Korea Selatan dan Indonesia mengadakan pertemuan JTF-EC ke-3 di Bali, yang sekaligus menjadi pertemuan pertama *Working Level Task Force Meeting (WLTFM)* hal ini dikarenakan kedua negara sepakat untuk memperbarui JTF-EC menjadi WLTFM. Perbaikan ini dilakukan untuk merealisasikan agenda kerja yang sudah disepakati melalui kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tujuannya untuk meratakan pembangunan nasional, dan investasi Korea Selatan di Indonesia dapat ditempatkan dan dijalankan di wilayah yang strategis dan potensial sesuai koridor dalam MP3EI.⁵⁸

⁵⁶ “Presiden SBY Berkunjung ke Korea Selatan - News Liputan6.com,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/145002/presiden-sby-berkunjung-ke-korea-selatan>.

⁵⁷ Alamsyah, “UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU 2010-2015.”

⁵⁸ *ibid.*

Pada tanggal 28 Februari 2012 dilakukan pertemuan WLTFM ke-3 antara Korea Selatan dan Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta. Pertemuan ini memiliki agenda peresmian sekretariat bersama, yang bertujuan mengawasi implementasi dari kesepakatan yang diperoleh dari setiap *Working group*. Pertemuan WLTFM ke-4 kembali dilakukan pada 12 Oktober 2012 di pulau Jeju, pertemuan ini dilakukan untuk menyepakati *Declaration of Jeju Initiative* yang bertujuan memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara dengan cara mengontrol dan mengkoordinir *Indonesia-Korea Joint Committee on Economic Cooperation*, WLTFM dan Sekretariat Bersama.⁵⁹

Kemudian pada 21-22 Mei 2012 Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan melalui DAPA (*Defense Acquisition Program Administration*) melakukan pertemuan *Defense Industry Cooperation Committee* (DICC) ke-1. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas kerjasama *Transfer of Technology* (ToT) antara kedua negara dalam bidang industri pertahanan. Dalam ToT kedua negara telah melakukan kerjasama diantaranya pembuatan kapal LPD, pesawat tempur KFX/IFX, kerjasama kendaraan tempur Tarantula, dan yang akan datang kerjasama kapal selam.⁶⁰

Pada 20 Oktober 2014 Jokowi resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia yang baru. Di akhir tahun 2014 tepatnya tanggal 10-12 Desember

⁵⁹ *ibid.*

⁶⁰ “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.kemhan.go.id/2012/05/25/indonesia-dan-korea-selatan-bahas-kerjasama-tot-industri-pertahanan.html>.

2014 Presiden Jokowi mengunjungi Korea Selatan dalam rangka KTT ASEAN-Korea Selatan. Sekaligus membahas kerjasama infrastruktur dan maritim dengan Korea Selatan. Dalam pertemuannya dengan Presiden Park, kedua pihak sepakat untuk mengadakan kembali JCM (Joint Commision Meeting) di tingkat Menteri Luar Negeri.⁶¹

Pada tanggal 23 April 2015 bertepatan dengan KAA Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Woo Yea mengunjungi Indonesia sekaligus untuk menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut PM Hwang menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara mitra strategis yang penting bagi Korea Selatan. Selain PM Hwang juga menyatakan terdapat tiga sektor yang akan difokuskan di Indonesia, yaitu sektor pertanian, pembangunan infrastruktur, dan dan manufaktur.⁶²

Empat bulan setelahnya, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2015 Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengunjungi Korea Selatan dalam rangka menjadi pembicara utama KTT Perdamaian di Korea Selatan. Dalam kesempatan itu JK juga melakukan beberapa pertemuan yaitu, pertemuan dengan pebisnis dan investor Korea Selatan untuk membahas peluang investasi di Indonesia. Pertemuan dengan PM Hwang Korea Selatan untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi khususnya dalam bidang tenaga kerja. JK berharap agar

⁶¹ “Jokowi ke Korea Selatan Bangun Kerja Sama Maritim - Nasional Tempo.co,” diakses 1 Agustus 2022, <https://nasional.tempo.co/read/627552/jokowi-ke-korea-selatan-bangun-kerja-sama-maritim>.

⁶² PT VIVA MEDIA BARU- VIVA, “Ini Tiga Sektor Investasi yang Ditawarkan RI ke Korsel,” 23 April 2015, <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/617493-ini-tiga-sektor-investasi-yang-ditawarkan-ri-ke-korsel>.

pemerintah Korea Selatan dapat menambah Kuota Pekerja Indonesia di Korea Selatan.⁶³

Tanggal 15-18 Mei 2016 Presiden Jokowi mengunjungi Korea Selatan dengan tujuan utama meningkatkan kepercayaan Investor Korea Selatan terkait perbaikan sektor Investasi di Indonesia. Dalam agendanya Presiden Jokowi akan mengadakan pertemuan dengan diaspora WNI di KBRI Seoul pada tanggal 15 malam. Kemudian keesokan harinya di tanggal 16 Presiden Jokowi akan menemui Presiden Park untuk membahas terkait isu ekonomi, politik, dan sosial budaya.⁶⁴

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan dengan tujuan peningkatan investasi, Setahun setelahnya pada 14 Maret 2017 kedua negara mengadakan pertemuan *Indonesia - Korea Business Summit* yang diadakan di Jakarta dengan tujuan memperkuat kerjasama dalam bidang investasi antara kedua negara. Investasi antara Korea Selatan dan Indonesia menurut data BKPM di 2012-2016 menyentuh angka 7,5 miliar USD dengan 7.607 proyek. Dengan angka tersebut Korea Selatan menduduki posisi ketiga negara investor tertinggi di Indonesia.⁶⁵

⁶³ “Wapres Minta Korea Selatan Tambah Kuota TKI,” diakses 1 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/27/21514821/Wapres.Minta.Korea.Selatan.Tambah.Kuota.TKI>.

⁶⁴ “Kunjungan Presiden RI ke Korsel Tambah Kepercayaan Investor,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160515152015-92-130798/kunjungan-presiden-ri-ke-korsel-tambah-kepercayaan-investor>.

⁶⁵ Okezone, “Jokowi Temui Pengusaha hingga Super Junior di Indonesia-Korea Business Summit 2017: Okezone Economy,” <https://economy.okezone.com/>, 14 Maret 2017, <https://economy.okezone.com/read/2017/03/14/320/1641996/jokowi-temui-pengusaha-hingga-super-junior-di-indonesia-korea-business-summit-2017>.

Presiden Moon Jae In dilantik menjadi Presiden baru Korea Selatan yang dilantik pada 10 Mei 2017. Dalam pemerintahan Presiden Moon Jae In Korea selatan menetapkan kebijakan *New Southern Policy* (NSP) untuk menyasar relasi kerjasama dengan negara ASEAN secara lebih optimal. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut Presiden Moon mengunjungi Indonesia pada tanggal 8-10 November 2017. Kedua pemimpin negara melalui “*Republic of Korea - Republic of Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace*” kemudian sepakat untuk meningkatkan status hubungan kedua negara dari *Strategic Partnership* menjadi *Special Strategic Partnership*, yang berfokus pada empat bidang kerjasama yaitu, pembangunan infrastruktur dan perdagangan bilateral, pertahanan dan hubungan luar negeri, *people-to people exchanges*, dan terakhir kerja sama regional dan global.⁶⁶

Merespon kunjungan Presiden Moon Jae In, pada 9 September 2018 Presiden Jokowi mengunjungi Korea Selatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Moon Jae In. Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk menandatangani MoU tentang kerjasama industri 4.0 dan kerjasama ekonomi. Selain itu pada pertemuan tersebut pemimpin kedua negara juga membahas terkait komitmen untuk melanjutkan IK-CEPA (Indonesia - Korea Comprehensive Economic Partnership) yang sudah digagas sejak tahun 2012 dengan tujuan meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Pembahasan terkait IK-

⁶⁶ Kemlu, profil negara dan hubungan bilateral.

CEPA juga dilanjutkan di sela-sela pertemuan East Asia Summit pada bulan November di Singapura, antara Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri MOTIE (*Ministry of Trade, Industry and Energy*) Korea Selatan. Kedua pihak menyepakati untuk memulai kembali perundingan IK-CEPA dengan tujuan mencapai kepentingan bersama.⁶⁷

Korea Selatan dan Indonesia pada 28 Juni 2019 menghadiri KTT G20 yang diadakan di Osaka, Jepang. Di sela-sela forum tersebut kedua pemimpin negara juga melakukan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan tersebut kedua negara membahas terkait kelanjutan kerjasama industri strategis dan investasi Korea Selatan di Indonesia. Kedua negara juga sepakat untuk segera menyelesaikan perundingan IK-CEPA. Presiden Moon juga menyampaikan tentang dukungannya terkait Konsep ASEAN mengenai Indo Pasifik.⁶⁸

Pada 23 November 2019 Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Busan untuk menghadiri KTT ASEAN-ROK Summit ke-30. Bersamaan dengan itu Presiden Jokowi menemui Presiden Moon Jae In untuk membahas terkait perlindungan terhadap ABK Indonesia yang bekerja di kapal panjang Korea Selatan. Presiden Jokowi juga menyampaikan terkait dukungannya terhadap Korea Selatan sebagai ketua MIKTA tahun 2020. Dalam pertemuan tersebut terdapat tiga MoU yang dihasilkan kedua negara

⁶⁷ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hubungan Bilateral [database on-line]. tersedia di https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu; Internet; diakses pada 01 Agustus 2022.

⁶⁸ "Jokowi Bersama Presiden Korsel Bahas Kerja Sama Industri Strategis di KTT G20 - Bisnis Liputan6.com," diakses 1 Agustus 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4000880/jokowi-bersama-presiden-korsel-bahas-kerja-sama-industri-strategis-di-ktt-g20>.

yaitu perjanjian bebas visa terhadap pemegang paspor diplomatik dan dinas Indonesia dan Korea Selatan, kerjasama teknik dalam pengembangan dan pemindahan Ibu Kota, dan deklarasi bersama dalam penyelesaian akhir Menteri negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan 10 CEO perusahaan besar di Korea Selatan pertemuan ini bertujuan untuk menarik investor datang ke Indonesia. Terakhir Presiden Jokowi juga menemui Ilmuwan Indonesia yang berada di Korea Selatan pertemuan tersebut membahas terkait Riset dan Inovasi untuk Indonesia kedepannya.⁶⁹

Perdagangan Indonesia Agus Supatmanto melakukan kunjungan singkat ke Seoul, Korea Selatan pada 18 Desember 2020 untuk menandatangani IK-CEPA dengan MOTIE Korea Selatan Sung Yun Mo. Penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen kepada negara untuk memperkuat hubungan ekonomi ditengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan sebelum Covid-19 melanda, IK-CEPA diharapkan dapat memulihkan ekonomi kedua negara secara lebih cepat. Cangkupan dalam IK-CEPA meliputi, perdagangan barang, mencangkup penghapusan atau penurunan tarif, fasilitas perdagangan, ketentuan asal barang, Prosedur

⁶⁹ Liputan6.com, "Deretan Tokoh Penting yang Ditemui Jokowi di Korea Selatan," liputan6.com, 26 November 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4119680/deretan-tokoh-penting-yang-ditemui-jokowi-di-korea-selatan>.

kepabeanan, dan trade remedies: investasi: perdagangan jasa: kerjasama ekonomi: dan pengaturan kelembagaan.⁷⁰

Pada 8-9 April 2021 Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Melakukan kunjungan ke Korea Selatan untuk membahas kerjasama pertahanan dan menghadiri peluncuran Pesawat Tempur KFX/IFX. Pada tanggal 8 April Prabowo Menteri Pertahanan Korea Selatan Suh Wook di Seoul. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas terkait keamanan regional dan penguatan kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selain itu dalam pertemuan tersebut Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Korea Selatan dalam membantu penanganan Covid-19 di Indonesia. Korea Selatan diketahui mengirimkan bantuan 10.000 PCR ke Indonesia pada 27 April 2020.⁷¹ Keesokan harinya pada tanggal 9 April Prabowo menghadiri peluncuran Pesawat Tempur KFX/IFX dengan nama resmi KF-21 Boramae. Pesawat tempur KF-21 Boramae ini merupakan hasil proyek bersama antara Korea Selatan dan Indonesia yang sudah dimulai sejak 9 Maret 2009. Total pembiayaan proyek pesawat tempur ini direncanakan 8 Miliar USD sampai 2026. Penanggungan biaya ini dibagi yaitu Korea Selatan sebanyak 80% dan Indonesia 20%.⁷²

⁷⁰ “Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,” diakses 1 Agustus 2022, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesiakorea-cepa-tonggak-baru-hubungan-ekonomi-bilateral-kedua-negara>.

⁷¹ “Prabowo Bertemu Menhan Korea Selatan, Sepakat Pererat Kerja Sama Militer,” diakses 1 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/15130091/prabowo-bertemu-menhan-korea-selatan-sepakat-pererat-kerja-sama-militer>.

⁷² “Prabowo Hadiri Langsung Peluncuran Pesawat Tempur KF-21 Boramae di Korsel,” diakses 1 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/16093931/prabowo-hadiri-langsung-peluncuran-pesawat-tempur-kf-21-boramae-di-korsel>.

Pada 25 Juni 2021 Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui Yong mengunjungi Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Kedua pihak sepakat untuk memperluas kerjasama dalam aspek kesehatan masyarakat dan penyediaan vaksin dalam mengatasi virus Corona yang baru. Kedua menteri juga sepakat untuk mempererat kerjasama agar proyek kerjasama antara kedua negara seperti proyek Pesawat Tempur KFX/IFX dapat berjalan lancar.⁷³ Dalam pertemuan itu Menteri Retno juga meminta Korea Selatan untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI khususnya ABK WNI. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak juga menandatangani *MoU on Triangular Cooperation dan Plan of Action* Implementasi Kemitraan Strategis Khusus untuk periode 2021-2025.⁷⁴

Pertemuan terakhir antara Korea Selatan dan Indonesia di masa pemerintahan Presiden Moon Jae In yaitu pada 22 Februari 2022 antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartanto dan MOTIE Korea Selatan Moon Sung Wook di Jakarta. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama JCEC (*Joint Committee Meeting on Economic Cooperation*) pada tingkat menteri. Dalam forum tersebut kedua pihak membahas dan menyepakati kerjasama di berbagai bidang yang direfleksikan pada empat *Working Group* yaitu perdagangan dan investasi,

⁷³ “Korea Selatan dan Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Demi Proyek Jet Tempur - Dunia Tempo.co,” diakses 1 Agustus 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1476560/korea-selatan-dan-indonesia-tingkatkan-kerja-sama-demi-proyek-jet-tempur>.

⁷⁴ “Bertemu Menlu Chung, Menlu Retno Minta Korea Selatan Lindungai Pekerja Migran RI - Dunia Tempo.co,” diakses 1 Agustus 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1476443/bertemu-menlu-chung-menlu-retno-minta-korea-selatan-lindungai-pekerja-migran-ri>.

energi dan sumber daya mineral, industri, dan *e-commerce*. Dalam pertemuan tersebut Korea Selatan dan Indonesia juga menandatangani MoU on *Special Economic Zone* dan MoU *Regarding Cooperation on Pilot Projects of Charging System for E-Vehicle*.⁷⁵

B. Strategi Korea Selatan mempengaruhi ASEAN melalui kebijakan

New Southern Policy

China merupakan negara yang memiliki pengaruh penting di ASEAN. Peran China di ASEAN meliputi, pembangunan infrastruktur, telekomunikasi, dan pertambangan. China merupakan sumber investor pertama pada beberapa negara ASEAN yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos. Pada beberapa negara lain seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam investasi China terus mengalami kenaikan. Dalam bidang perdagangan China merupakan mitra dagang terbesar ASEAN pada tahun 2014 dengan volume perdagangan mencapai 336,5 miliar USD.⁷⁶

Djayadi Hanan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa selama hampir sepuluh tahun terakhir, pengaruh China di kawasan Asia maupun Indonesia meningkat tajam. Untuk pertama kalinya pada 2019 pengaruh China melampaui Amerika Serikat. Pada 2019

⁷⁵ “Sepakati Berbagai Kerja Sama Strategis, Indonesia dan Korea Selatan Saling Dukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3741/sepakati-berbagai-kerja-sama-strategis-indonesia-dan-korea-selatan-saling-dukung-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi>.

⁷⁶ “Menimbang Ekspansi Ekonomi China di ASEAN,” SINDOnews.com, diakses 4 Januari 2023, <https://nasional.sindonews.com/berita/1171946/18/menimbang-ekspansi-ekonomi-china-di-asean>.

ekspor China mengalami kenaikan, sementara dengan AS turun hampir 11 persen di tengah perang dagang antara kedua negara.⁷⁷

Sebagai negara *middle power* Korea Selatan berambisi untuk mencari otonomi strategis yang lebih besar. Melalui kebijakan NSP Korea Selatan berusaha mengambil tanggung jawab dan peran internasional yang lebih besar khususnya di wilayah ASEAN dan India. Dalam hal ini Korea Selatan mencoba menjangkau negara-negara ASEAN dan India melalui pembangunan dan perdagangan. Dalam bidang pembangunan, Korea Selatan dinilai sebagai negara yang berhasil dalam pembangunan ekonomi oleh negara-negara berkembang. Untuk menjangkau negara ASEAN dalam bidang pembangunan Korea Selatan membentuk ODA (*Official Development Assistance*).⁷⁸ Korea Selatan telah mengucurkan ODA ke ASEAN sebesar \$1.823 juta dalam bentuk hibah ODA dan \$2.605 juta dalam bentuk pinjaman sejak 1967-2017.⁷⁹

Dalam bidang perdagangan Korea Selatan melalui kebijakan NSP menciptakan FTA (*Free Trade Agreement*) dengan tujuan meningkatkan volume perdagangan dengan negara-negara ASEAN. Dalam hal ini Korea Selatan membentuk AK-FTA *ASEAN Korea Free Trade Area* yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2015, dan mulai direalisasikan

⁷⁷ “Pengaruh China Besar di Asia Termasuk Indonesia,” VOA Indonesia, diakses 4 Januari 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/pengaruh-china-besar-di-asia-termasuk-indonesia/5252330.html>.

⁷⁸ “2021, Choe Wongi - New Southern Policy. Korea’s Newfound Ambition in Search of Strategic Autonomy | PDF | World Politics | South Korea,” Scribd, diakses 10 Januari 2023, <https://www.scribd.com/document/548630589/2021-Choe-Wongi-New-Southern-Policy-Korea-s-Newfound-Ambition-in-Search-of-Strategic-Autonomy>.

⁷⁹ “Korea Dan ASEAN,” diakses 9 Januari 2023, <https://bit.ly/2rDAet7>.

pada tanggal 12 November 2018. Dalam perjanjian ini Korea Selatan dan ASEAN sepakat untuk menghapus tarif perdagangan 80%, Mengizinkan pengiriman barang bolak-balik di dalam negara-negara anggota, Mengizinkan faktur barang pihak ketiga, dan melindungi akses pasar.⁸⁰

Disamping menciptakan FTA secara regional, Korea Selatan melalui kebijakan NSP juga menciptakan FTA secara bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN secara lebih intim. Dengan Indonesia sendiri Korea Selatan menyepakati IK-CEPA yang secara resmi diterapkan pada 2020. Korea Selatan mengeliminasi 95,54% pos tarifnya. Sementara, Indonesia mengeliminasi 92,06% pos tarifnya. Sementara dengan Kamboja Korea Selatan menetapkan CKFTA (*Cambodia-Korea Free Trade Agreement*) yang ditandatangani pada 21 Oktober 2021.⁸¹ Sementara dengan Vietnam Korea Selatan menandatangani VKFTA (*Vietnam-Korea Free Trade Agreement*) pada 5 Mei 2015 dan mulai berlaku pada 20 Desember 2015.⁸²

Pada 2018, perdagangan antara Korea Selatan dan ASEAN mencapai 159,74 miliar USD, 100,11 miliar USD dalam ekspor dan 59,63 miliar USD dalam impor. Angka ini menjadikan ASEAN sebagai mitra dagang terbesar kedua Korea Selatan.

⁸⁰ “AK-FTA,” diakses 9 Januari 2023, <http://ftacenter.kemendag.go.id/ak-fts>.

⁸¹ “Cambodia-South Korea free trade agreement goes into effect Dec 1, 2022 | The Star,” diakses 9 Januari 2023, <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/11/26/cambodia-south-korea-free-trade-agreement-goes-into-effect-dec-1-2022>.

⁸² “TTWTO VCCI - (FTA) Full Text of Vietnam-Korea Free Trade Agreement (VKFTA),” diakses 9 Januari 2023, <https://wtocenter.vn/chuyen-de/12689-vkfts-full-content>.

Gambar. 4.1 Mitra dagang utama Korea Selatan di ASEAN dalam satuan 100 juta USD

Rank	Country	Trade	Export	Import
1	Vietnam	639.3	477.5	161.8
2	Singapore	205.6	116.5	89.1
3	Indonesia	179.7	84.0	95.7
4	Malaysia	167.7	80.5	87.2
5	Philippines	142.9	105.9	37.0
6	Thailand	126.8	74.7	52.1
7	Myanmar	10.3	5.7	4.6
8	Cambodia	8.6	6.0	2.6
9	Brunei	8.6	0.6	8.0
10	Lao PDR	1.2	0.9	0.3

Sumber: ASEAN Korea Center ASEAN-KOREA CENTRE : ASEAN - ASEAN-Korea Relations (aseankorea.org)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Vietnam merupakan negara dengan nilai perdagangan tertinggi ke Korea Selatan dengan total perdagangan 636 miliar USD. Dilanjutkan dengan Singapura dengan total perdagangan 205 miliar USD. posisi ketiga yaitu Indonesia dengan total perdagangan 179 miliar USD.

C. Penerapan Kebijakan *New Southern Policy* di Indonesia

1. Kebijakan *New Southern Policy*

Dilantiknya Presiden Moon Jae In pada Mei 2017 memberikan terobosan baru bagi hubungan luar negeri Korea Selatan. Pasalnya Presiden

Moon mengeluarkan kebijakan baru yang mengarah ke negara ASEAN dan India yaitu *New Southern Policy*. Kebijakan NSP pertama kali disampaikan dalam forum bisnis Korea Selatan-Indonesia di Jakarta pada November 2017. Presiden Moon mengatakan tujuan dari dikeluarkannya kebijakan NSP yaitu untuk meningkatkan hubungan Korea Selatan dengan ASEAN dan India setara dengan empat negara *major powers*. Kebijakan NSP sendiri memiliki tiga pilar utama yaitu *People* (Kerjasama sosial budaya), *Prosperity* (Kerjasama ekonomi), dan *Peace* (Kerjasama politik dan keamanan).⁸³ Tiga pilar ini akan dijelaskan sebagai berikut:⁸⁴

- 1) *People*, aspek ini sangat mendukung bagi Korea Selatan untuk memperkuat *soft powernya* dengan meningkatkan keterlibatan sosial budaya dan masyarakat di ASEAN dan India. Aspek *people* dalam NSP mengutamakan Pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya, dan kapasitas administrasi publik.
- 2) *Peace*, aspek *peace* berfokus pada Kerjasama politik dan keamanan, namun aspek perdamaian ini lebih dibatasi daripada aspek-aspek lain dalam NSP. Hal ini dikarenakan Korea Selatan menghindari isu keamanan regional yang sensitif. Aspek perdamaian berfokus pada lima isu utama yaitu: Kerjasama industri pertahanan, unifikasi

⁸³ Kathryn Botto, "South Korea Beyond Northeast Asia: How Seoul Is Deepening Ties With India and ASEAN," Carnegie Endowment for International Peace, diakses 25 Oktober 2022, <https://carnegieendowment.org/2021/10/19/south-korea-beyond-northeast-asia-how-seoul-is-deepening-ties-with-india-and-asean-pub-85572>.

⁸⁴ *ibid*

Semenanjung Korea, pertukaran diplomatik, kemampuan tanggap darurat, dan tanggap Bersama dalam merespon terorisme.

- 3) *Prosperity*, kebijakan NSP sendiri pada dasarnya memang lebih difokuskan pada aspek kemakmuran dan Kerjasama ekonomi. Itulah mengapa pada saat pengenalan pertamanya dilakukan pada forum bisnis. Terdapat dua alasan dalam fokus aspek *Prosperity* ini, yaitu: pertama, ekonomi Korea Selatan yang bergantung terhadap US dan China menyebabkan kebutuhan Korea Selatan terhadap diversifikasi ekonomi dibalik NSP semakin kuat. Kedua, Kerjasama Korea Selatan dengan negara tujuan NSP sebelumnya memang sudah berjalan cukup signifikan, hal ini didorong pula oleh perusahaan Korea Selatan yang mencari manufaktur dan tempat produksi baru untuk mengurangi ketergantungannya dengan China sekaligus memperluas pasar.

Lebih lanjut fokus tujuan *Prosperity* dari kebijakan NSP dalam penjabarannya sebagai berikut:⁸⁵

1. Meningkatkan kerangka kelembagaan untuk promosi perdagangan dan investasi

Melalui kebijakan NSP, Korea Selatan mengejar perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral dengan negara-negara anggota ASEAN, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik bagi perusahaan kedua belah pihak.

⁸⁵ Nsp booklet

2. Berpartisipasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara target NSP untuk meningkatkan konektivitas kawasan.

Mendukung perusahaan Korea untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di negara target NSP melalui kerja sama bilateral di bidang-bidang utama yang dapat mempromosikan konektivitas di kawasan tersebut seperti transportasi, manajemen sumber daya energi dan air.

3. Memberikan dukungan bagi UKM untuk membuat terobosan ke pasar luar negeri

Korea Selatan akan memperluas dukungan terhadap UKM Korea untuk membantu mereka memasuki pasar negara target NSP, khususnya pasar yang menjanjikan produk pertanian dan perikanan Korea (K-Food, K-Seafood) dan produk kosmetik (K-Beauty).

4. Meningkatkan kapasitas untuk pertumbuhan inovatif melalui kerjasama dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan industri baru.

Korea Selatan akan memperkuat kerjasama Korea-ASEAN-India dalam sains, teknologi, dan industri baru untuk membangun platform inovasi terbuka global dan bersama-sama menanggapi Revolusi Industri Keempat.

5. Mengembangkan model kerja sama yang disesuaikan yang memenuhi kebutuhan masing-masing negara mitra.

Korea Selatan akan mengadopsi model kerja sama yang disesuaikan untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi di industri utama, seperti

industri pertanian, perikanan, mobil, baja, dan petrokimia, berdasarkan kebutuhan masing-masing negara mitra.

Gambar 4. 2 Teks Wawancara Presiden Moon Jae In

WAWANCARA PRESIDEN KOREA SELATAN

Relasi Antarmasyarakat Penting

Pengantar
Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, Senin (10/9/2018), di Seoul. Kunjungan ini berlangsung setelah kedatangan Moon ke Indonesia, November 2017. Dalam rangka kunjungan Presiden RI, Kompas mewawancarai Moon via surat elektronik. Sebagai pengantar jawabannya, ia menyampaikan terlebih dahulu ucapan selamat untuk Indonesia atas keberhasilan Asian Games 2018.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan penyelenggaraan Asian Games 2018. Saya gembira Indonesia menduduki posisi empat besar Asian Games 2018 yang merupakan pesta olahraga yang menyatukan 45 negara peserta se-Asia. Semangat dan energi Asia dirasakan dan dinikmati semua warga dunia.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan segenap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Asian Games atas dukungan mereka sehingga kontingen Korea Selatan dan Korea Utara dapat ber-



ISTANA KEPRESIDENAN KOREA SELATAN/JINSEOK KIM

Moon Jae-in

juga mendorong pembangunan ekonomi inklusif yang menguntungkan masyarakat luas.

Pilar terpenting hubungan Indonesia-Korsel adalah masyarakat. Masyarakat Korsel menyukai alam, kebudayaan, dan makanan Indonesia sehingga rata-rata 350.000 orang Korea berkunjung ke Indonesia setahun. Saya senang dan berterima kasih karena masyarakat Indonesia juga menyukai budaya Korea yang disebut *Hallyu* atau gelombang budaya Korea, seperti drama Korea dan K-pop. Keakraban di antara masyarakat kedua negara menjadi pendorong besar bagi Indonesia dan Korsel untuk terus melakukan terobosan dalam mempererat hubungan.

Maka, tak lama setelah pelantikan saya sebagai presiden, saya menugaskan utusan khusus ke ASEAN untuk pertama kali dalam sejarah kami. Kemudian saya memilih Indonesia sebagai negara pertama ASEAN yang saya kunjungi.

Guna meningkatkan hubungan Korsel dengan ASEAN secara drastis, saya mendorong pelaksanaan Kebijakan Baru

(Bersambung ke him 15 kol 1-5)

partisipasi dalam tim gabungan, berparade bersama saat pembukaan.

Mengapa Indonesia penting? Apa pilar penting dalam menjalin hubungan Indonesia-Korsel saat ini?

Indonesia adalah negara besar yang jumlah penduduknya menempati peringkat keempat terbanyak di dunia. Indonesia memiliki beragam suku dan bahasa yang merupakan satu kesatuan. Indonesia menunjukkan rasio pertumbuhan ekonomi stabil hingga 5 persen. Indonesia menjadi negara penting di ASEAN, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merakyat. Saya

Sumber: visitkorea.co.id, Korea Tourism Organization Indonesia
 Wawancara Eksklusif Presiden Korea Selatan Mr. Moon Jae In
 (visitkorea.or.id)

Dalam teks wawancara Presiden Moon Jae In dengan salah satu surat kabar di Korea Selatan, Presiden Moon mengatakan bahwa ASEAN

merupakan negara yang semakin maju dan penting secara internasional. peningkatan hubungan dengan ASEAN dilakukan untuk mendiversifikasi diplomasi Korea Selatan. Melalui kebijakan NSP Presiden Moon ingin memperluas kerjasama Korea Selatan dan ASEAN dengan tujuan membangun kemitraan masa depan demi masyarakat, perdamaian, dan kesejahteraan Bersama. Sementara Indonesia menurut Presiden Moon merupakan negara penting di ASEAN dengan rasio pertumbuhan ekonomi yang stabil mencapai 5% dan memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat secara global.⁸⁶

Gambar 4. 3 Teks Wawancara Lanjutan Presiden Moon Jae In

Relasi Antarmasyarakat Penting

(Sambungan dari halaman 1)

ke Arah Selatan (New Southern Policy). Lingkup kerja sama kedua negara meluas hingga mencakup pengembangan dan produksi bersama pesawat tempur serta kapal selam. Kedua negara akan meningkatkan perdagangan hingga 30 miliar dollar AS sampai tahun 2022 serta memperkuat kerja sama di bidang petrokimia, otomotif, dan manufaktur peralatan mesin.

Anda berperan menentukan dalam menciptakan situasi positif di Semenanjung Korea saat ini. Apa elemen terpenting dalam kebijakan Semenanjung Korea?

Kebijakan di Semenanjung Korea hakikatnya mencegah terulangnya perang. Terciptanya perdamaian dalam kehidupan sehari-hari lama didambakan warga Korsel. Lewat Deklarasi Panmunjeom 27 April dan Pernyataan Bersama Korut-AS 12

Juni, pemimpin Korsel, Korut, dan AS menegaskan tujuan bersama terkait denuklirisasi penuh dan penciptaan perdamaian di Semenanjung Korea. Kesepakatan bersejarah kedua pemimpin menjadi tonggak menuju perdamaian dan kesejahteraan di Semenanjung Korea.

Hal yang penting adalah mengimplementasikan hasil kesepakatan secara tulus. Kami akan mempercepat prosesnya sampai akhir tahun ini agar tak kembali ke situasi sebelumnya. Untuk itu, membangun rasa saling percaya sangat penting. Sebagai tahap krusial membangun kepercayaan, lebih baik jika dilaksanakan deklarasi mengakhiri perang, yakni mengakhiri permusuhan di Semenanjung Korea. Korsel sebagai negara yang sangat berkepentingan akan mengerahkan segala upaya untuk mengembangkan hubungan Korsel-Korut, meningkatkan hubungan Korut-AS, serta

mempercepat denuklirisasi.

Langkah apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk mendukung penciptaan perdamaian di Semenanjung Korea?

Terima kasih atas perhatian dan dukungan Indonesia dalam penciptaan perdamaian di Semenanjung Korea. Utusan khusus yang dikirim Presiden Joko Widodo ke Korsel dan Korut untuk mengundang pemimpin kedua negara pada pembukaan Asian Games 2018 sangat istimewa bagi kami karena merupakan dukungan besar. Sayangnya, saya berhalangan hadir.

Indonesia menjalin hubungan baik dengan Korut sejak 1950-an. Jika dapat merangkul Korut dalam kerangka kerja sama dan peningkatan pertukaran yang beragam, seperti Asian Games, hal itu akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian di Semenanjung Korea serta kesejahteraan di Indonesia. Kami berharap Indo-

nesia terus berperan konstruktif dalam mewujudkan denuklirisasi penuh dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea. *Anda mencanangkan Kebijakan Baru ke Arah Selatan pada kunjungan ke Indonesia tahun lalu. Apa tujuan utamanya?*

Kini ASEAN sangat penting di kancah internasional. Saya yakin ASEAN kian jaya, tak hanya di wilayah sendiri, tetapi juga dunia. Maka, peningkatan hubungan Korsel-ASEAN penting. Hal ini merupakan satu upaya mendiversifikasi diplomasi Korsel. Peningkatan hubungan Korsel-ASEAN agar sejajar terhadap hubungan Korsel dengan empat negara kuat di sekitarnya mengandung arti Korea ingin memperluas lingkup kerja sama, tak hanya ekonomi, tetapi semua bidang, termasuk diplomasi dan keamanan.

Hal itu merupakan visi dalam Kebijakan Baru ke Arah Selatan yang saya deklarasikan di Ja-

karta pada November 2017. Tujuan utamanya, membangun kemitraan masa depan demi masyarakat, kesejahteraan bersama, dan perdamaian dengan memperluas hubungan kerja sama Korsel-ASEAN. Kebijakan Selatan Baru diharapkan memperkokoh landasan kerja sama persahabatan dengan meningkatkan pertukaran antarmasyarakat, memperbanyak kesempatan mencapai kesejahteraan bersama, serta memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Indonesia selama ini berperan penting dalam memimpin proses pendirian dan pengintegrasian ASEAN. Dalam perjalanan Korsel dan ASEAN untuk membangun komunitas penuh damai yang meniknati kesejahteraan bersama serta mengutamakan masyarakat, saya berharap kerja sama kian erat antara Indonesia dan Korsel dapat terus terjalin. (ATO)

Sumber: visitkorea.co.id, [Korea Tourism Organization Indonesia](http://korea-tourism-organization-indonesia.org)
Wawancara Eksklusif Presiden Korea Selatan Mr. Moon Jae In
(visitkorea.or.id)

⁸⁶ Imagine your korea, “Wawancara Eksklusif Presiden Korea Selatan Mr. Moon Jae In”, diakses 25 Oktober 2022, <https://visitkorea.or.id/article/wawancara-esklusif-presiden-korea-selatan-mr-moon-jae-in>,

Untuk merealisasikan kebijakan NSP Presiden Moon telah melakukan kunjungan kenegaraan ke 10 negara anggota ASEAN pada 2019. Korea Selatan juga meningkatkan pangkat Duta Besar untuk misi ASEAN ditingkatkan menjadi lebih tinggi, dari direktur jenderal. Mantan wakil Menteri Korea Selatan juga ditunjuk sebagai kepala baru untuk misi ASEAN, staf diplomatik profesional untuk misi ini juga ditingkatkan menjadi tiga kali lipat oleh Korea Selatan. Tidak hanya itu pada Mei 2019 kementerian luar negeri Korea Selatan juga membentuk biro baru yaitu biro urusan ASEAN yang bertujuan untuk menangani urusan ASEAN.⁸⁷

Selain itu dalam merealisasikan kebijakan NSP pada tahun 2018 Korea Selatan memberikan 47,7% dari keseluruhan ODA (*Official Development Assistance*) ke negara penerima ODA di Asia. Korea Selatan juga diperkirakan akan meningkatkan jumlah ODA ke negara ASEAN, KOICA (*Korea International Cooperation Agency*) sebagai badan bantuan luar negeri Korea Selatan pada Mei 2019 mengatakan akan memberikan pada 2023 untuk enam penerima di ASEAN. Dalam rencana ini KOICA akan meningkatkan gabungan ODA untuk negara Indonesia, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Filipina dari 87 miliar Won pada 2019 menjadi 180,4 miliar Won pada 2023.⁸⁸ Sementara dalam sektor Perdagangan melalui NSP Korea Selatan mengharapkan dapat mencapai total perdagangan dengan negara ASEAN sebesar 200 miliar USD. Namun

⁸⁷ Choe Wongi, “‘New Southern Policy’: Korea’s New found Ambition in Search of Strategic Autonomy,” t.t., 24.

⁸⁸ Ibid

sangat disayangkan hal ini tidak dapat tercapai karena adanya pandemic Covid-19.⁸⁹

2. *Special Strategic Partnership* Korea Selatan dan Indonesia.

Sebagai bentuk penerapan dari kebijakan *New Southern Policy* di Indonesia, Korea Selatan meningkatkan status hubungan kemitraan dengan Indonesia dari *Strategic Partnership* menjadi *Special Strategic Partnership* saat kunjungan Presiden Moon ke Indonesia pada 10 November 2017. Dalam kunjungan tersebut Presiden Moon mengatakan harapan besar untuk kemitraan yang lebih baik antara kedua negara. Terlebih lagi Indonesia dan Korea Selatan memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan pemerintahan yaitu mengutamakan rakyat dan mengembangkan ekonomi yang bersifat toleran.⁹⁰ Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang memiliki status *special strategic partnership* dengan Korea Selatan. Indonesia memiliki kekuatan yang menonjol diantara negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki banyak peran penting sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia juga memiliki populasi besar yang menyumbang 40% dari total populasi negara ASEAN. Masyarakat Indonesia juga didominasi oleh penduduk yang berusia produktif sehingga menyebabkan penyerapan

⁸⁹ Botto, "South Korea Beyond Northeast Asia."

⁹⁰ Kementerian Sekretariat Negara, "Indonesia-Korea Selatan Sepakat Tingkatkan Status Kemitraan | Sekretariat Negara," diakses 25 Oktober 2022, https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_korea_selatan_sepakat_tingkatkan_status_kemitraan.

budaya digital cepat. Hal ini menjadi nilai yang potensial untuk negara yang memiliki fokus terhadap penyebaran budaya seperti Korea Selatan.⁹¹

Kata *special strategic partnership* memiliki maksud dan makna yang khusus. Istilah *strategic* digunakan untuk negara yang diakui memiliki peran dalam dunia global.⁹² Sementara kata *spesial* di Indonesia digunakan atas tiga alasan menurut duta besar Kim Chang Beom, diantaranya:⁹³

- 1) Korea selatan melihat Indonesia sebagai negara *leading nation* atau pemimpin di ASEAN. Terlebih Indonesia merupakan negara demokratis yang stabil, memiliki populasi terbesar di ASEAN, memiliki banyak penduduk usia produktif, dan middle class yang tumbuh secara signifikan.
- 2) Penetapan kebijakan *New Southern Policy*, yang bertujuan meningkatkan Kerjasama dengan negara ASEAN, termasuk Indonesia.
- 3) Hubungan Kerjasama yang dilakukan antara Korea Selatan dan Indonesia akan jauh lebih komprehensif dibandingkan sebelumnya.

⁹¹ HanHae Hong, Mahasiswa Korea Selatan di Khazar University and Research in Eurasian, (wawancara pribadi oleh peneliti pada tanggal 14 Desember 2022 secara daring melalui Zoom Cloud Meetings)

⁹² “전략적 동반자 관계란,” diakses 25 Oktober 2022, <https://m.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20100127005009>.

⁹³ Author TeguhTimur, “Dubes Kim Changbeom: Indonesia Adalah Partner Alami Korea,” *Teguh Santosa* (blog), 13 Juli 2018, <https://teguhtimur.com/2018/07/13/dubes-kim-changbeom-indonesia-adalah-partner-alami-korea/>.

Hubungan *special strategic partnership* antara Korea Selatan dan Indonesia berfokus pada empat bidang Kerjasama diantaranya:

1) Pertahanan dan hubungan luar negeri.

Dalam bidang pertahanan kedua negara sepakat untuk meningkatkan Kerjasama strategis dalam bidang keamanan dengan tujuan melancarkan komunikasi strategis. Sementara dalam bidang hubungan luar negeri kedua negara sepakat untuk membentuk pertemuan antar pemerintahan.

2) Perdagangan bilateral dan pengembangan infrastruktur

Kedua negara sepakat untuk melakukan Kerjasama ekonomi yang didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang bersifat toleran dan lebih mementingkan rakyat.

3) Kerjasama regional dan global

Kedua negara sepakat untuk mengeratkan Kerjasama dalam lingkup regional dan global.

4) *People-to-people exchanges*

Kedua negara menyepakati untuk memperluas pertukaran masyarakat antar kedua negara dengan tujuan memperkuat hubungan kedua negara, dan meningkatkan upaya perlindungan masyarakat kedua negara.

Mengacu pada dokumen RI-ROK joint vision statement for co-prosperity and peace yang dikeluarkan pada 9 November 2017 di istana

Bogor dan menjadi dasar prioritas Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan
Prioritas Kerjasama ekonomi yang disepakati diantaranya:⁹⁴

- 1) Membuat mekanisme baru atau meningkatkan komunikasi strategis pada tingkat tinggi menggunakan beragam mekanisme konsultasi bilateral yang ada.
- 2) Meningkatkan serta memperluas hubungan perdagangan dan investasi dengan tujuan dapat mencapai target perdagangan sebesar 30 miliar USD pada tahun 2022, serta mendorong akses pasar terhadap produk-produk buah-buahan, perikanan, dan palm oil Indonesia ke Korea Selatan.
- 3) Pemerintah Indonesia mendorong untuk perusahaan Korea Selatan mengembangkan bisnis dan investasi di Indonesia, khususnya dalam membangun infrastruktur dan konektivitas, mendukung percepatan industrialisasi, dan pembangunan di daerah-daerah.
- 4) Korea Selatan mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat infrastruktur dengan menggunakan *Global Infrastructure Fund* dan *Economic Development Fund*, yang meliputi transportasi, pengelolaan air, perumahan rakyat, dan pembangkit tenaga listrik.

⁹⁴ “KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SEOUL, REPUBLIK KOREA,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses 16 Januari 2022, <https://kemlu.go.id/seoul/id/>.

- 5) Korea Selatan dan Indonesia menyepakati untuk memfasilitasi investasi di sektor-sektor pertumbuhan baru (*new growth engine*) seperti *content industry*, teknologi informasi, pariwisata, Kesehatan dan jasa pelayanan medis, dan energi ramah lingkungan.
- 6) Indonesia dan korea selatan mulai melakukan Kerjasama triangular dengan tujuan membantu pembangunan di negara ketiga.

D. Implementasi Kebijakan *New Southern Policy* dalam kepentingan Korea Selatan terhadap Indonesia

1. Peningkatan Perdagangan melalui IK-CEPA

Sebelum ditetapkan kebijakan NSP hubungan ekonomi Korea Selatan sangat bergantung pada China. China merupakan negara tujuan ekspor utama Korea Selatan yang menyumbang 25% volume ekspor Korea Selatan dengan nilai 234.5 Miliar USD pada 2014. Namun sayangnya pada 7 Juli 2016 Korea Selatan melakukan kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menempatkan sistem anti rudal THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*). Korea Selatan menempatkan THAAD ini dengan tujuan menghindari ancaman nuklir dari Korea Utara. Disisi lain China sebagai negara tetangga yang dekat dengan Korea Selatan tidak setuju dengan penempatan THAAD karena dinilai dapat mengancam teritorial dan dapat mendeteksi sistem keamanan negaranya. Hubungan antara China dan

Amerika Serikat beberapa tahun ini memang cukup buruk. Sehingga dari penempatan THAAD China tidak ingin pengaruh Amerika Serikat semakin kuat di Asia Timur.⁹⁵

Sebagai bentuk protes terhadap Korea Selatan dari penempatan THAAD China melakukan boikot terhadap beberapa sektor ekonomi Korea Selatan dimulai sejak 2016. Protes yang dilakukan China diantaranya, menghentikan impor produk kosmetik Korea Selatan, larangan terhadap Produk *entertainment* Korea Selatan, boikot terhadap gerai Lotte Group di Tiongkok, dan boikot terhadap sektor pariwisata Korea Selatan.⁹⁶

Kebijakan *New Southern Policy* salah satunya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap China dan untuk mencari otonomi strategis yang lebih luas secara global.⁹⁷ Kebijakan *New Southern Policy* memiliki salah satu fokus yaitu pada pilar *Prosperity*. Pilar *Prosperity* sendiri berfokus pada beberapa bidang, salah satunya bidang perdagangan. Perdagangan antar negara merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan ekonomi nasional. Korea Selatan merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam bidang perdagangan. Trend Perdagangan antara Korea Selatan dan Indonesia mengalami penurunan sebesar -10.43% pada periode 2013-2017. Setelah Korea Selatan menetapkan Kebijakan NSP dan

⁹⁵ Made Cynthia Paramitha, "UPAYA DIPLOMASI KOREA SELATAN MEMPERBAIKI HUBUNGAN EKONOMI DENGAN TIONGKOK PASCA PEMASALAHAN TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD)" (JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL, t.t.).

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ "Hyundai, Naver, dan New Southern Policy Korea Selatan - Ekonomi Bisnis.com," diakses 30 Maret 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210430/9/1388775/hyundai-naver-dan-new-southern-policy-korea-selatan>.

meningkatkan status kemitraan dengan Indonesia menjadi *Special Strategic Partnership* pada November 2017. Di tahun 2018 Perdagangan Korea Selatan dan Indonesia meningkat menjadi 18.57 Miliar USD naik 12.58% dari periode sebelumnya.⁹⁸

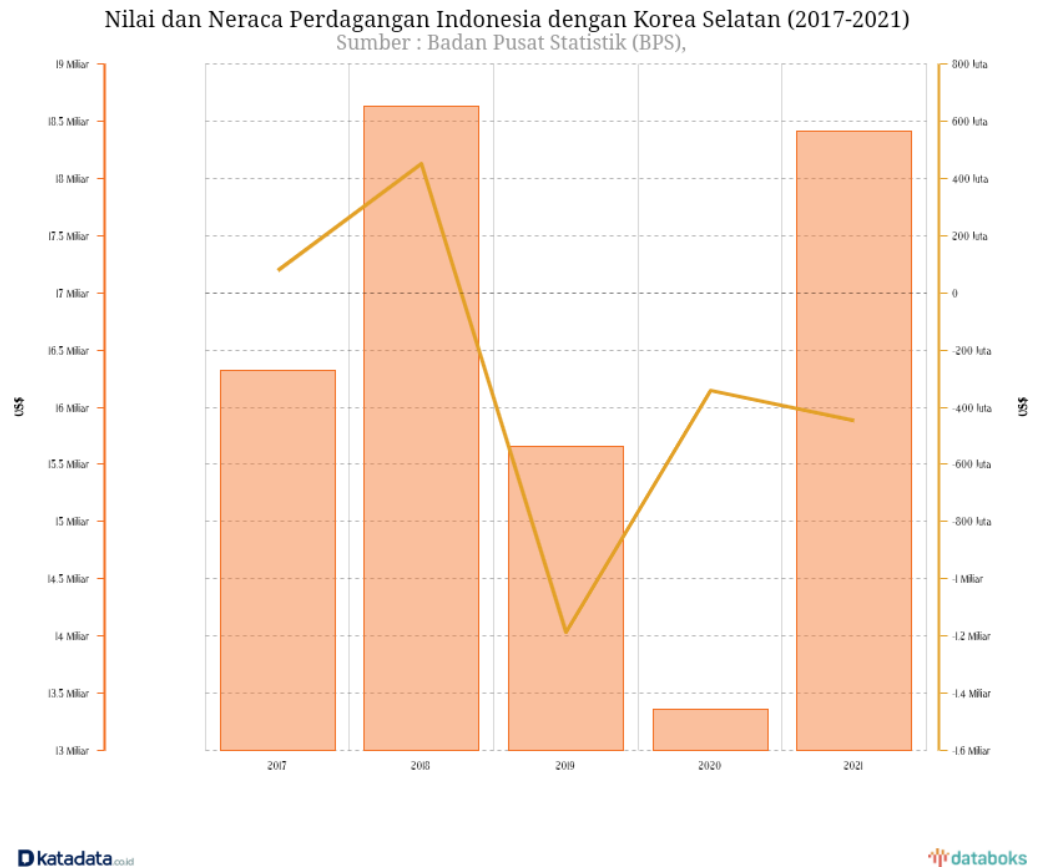
Setelah kebijakan NSP ditetapkan, kedua negara memutuskan untuk mencoba meningkatkan perdagangan bilateral menjadi \$30 miliar pada tahun 2022, dan Presiden Joko Widodo mendorong perusahaan Korea untuk memperluas investasi di bidang yang akan membantu mempercepat industrialisasi Indonesia, memperluas infrastruktur, meningkatkan konektivitas, dan mengembangkan wilayah. Terlepas dari pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan rantai pasokan global, pertukaran ekonomi kedua negara meningkat 38% *year-on-year* pada tahun 2021, menekankan bahwa potensi kerja sama ekonomi kedua negara sangat besar⁹⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁸ “KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SEOUL, REPUBLIK KOREA.”

⁹⁹ HanHae Hong, Mahasiswa Korea Selatan di Khazar University and Research in Eurasian, (wawancara pribadi oleh peneliti pada tanggal 14 Desember 2022 secara daring melalui Zoom Cloud Meetings)

Gambar 4. 4 Neraca Perdagangan Korea Selatan dan Indonesia



Sumber: Neraca Perdagangan RI-Korsel Defisit Terus sejak 2019
(katadata.co.id)

Setelah kebijakan NSP ditetapkan perdagangan Korea Selatan dan Indonesia tumbuh di tahun 2018 dari 16.3 juta USD menjadi 18.6 Juta USD.

Namun sayangnya selama tahun 2019 dan 2020 perdagangan kedua negara mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan wilayah dan *lockdown* di beberapa negara. Tentu saja hal ini mempengaruhi turunnya angka perdagangan Indonesia dan Korea Selatan. Pada kuartal kedua 2020 PDB Korea Selatan menyusut 2,9% dari tahun lalu. Sementara PDB Indonesia juga mengalami penurunan

dari 2.735,9 triliun rupiah pada kuartal kedua 2019 menjadi 2.590 triliun pada kuartal kedua 2020.¹⁰⁰ Di 2021 setelah kesepakatan IK-CEPA (*Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*) perdagangan kedua negara mulai meningkat kembali menjadi 18.40 miliar USD yang hampir mencapai angka perdagangan di tahun 2018.¹⁰¹

Menurut pandangan liberalisme dalam buku Scott Burchill salah satu cara untuk menghindari perang dan mencapai perdamaian antar negara yaitu dengan menciptakan perdagangan bebas. Perdagangan bebas juga akan meruntuhkan kecurigaan dan perpecahan antar negara dan dapat menyatukan individu dalam satu komunitas. Dalam hal ini, Korea Selatan melalui kebijakan NSP membentuk pasar bebas dengan negara-negara ASEAN melalui AKFTA. Sementara dengan Indonesia sendiri Korea Selatan membentuk IK-CEPA yang bertujuan untuk mengurangi post tarif perdagangan antara kedua negara. Melalui IK-CEPA ini kepentingan Korea Selatan untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan perluasan pasar di Indonesia dapat tercapai. Selain itu melalui IK-CEPA Korea Selatan dapat menciptakan masyarakat yang saling terhubung dan menghilangkan perpecahan dengan Indonesia.

¹⁰⁰ “(PDF) Kontribusi Korea Selatan Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi,” diakses 25 Oktober 2022, https://www.researchgate.net/publication/362772136_Kontribusi_Korea_Selatan_Dalam_Pemulihan_Ekonomi_Indonesia_Pasca_Pandemi.

¹⁰¹ “Neraca Perdagangan RI-Korsel Defisit Terus Sejak 2019 | Databoks,” diakses 25 Oktober 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23/neraca-perdagangan-ri-korsel-defisit-terus-sejak-2019>.

IK-CEPA merupakan salah satu upaya yang dilakukan Korea Selatan dan Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, termasuk perdagangan. IK-CEPA sendiri mulai diaktifkan kembali pada 19 Februari 2019 melalui deklarasi dokumen *Joint Ministerial on the Launch of the Reactivation of Navigations for the IK-CEPA*. Pada 18 Desember 2020 IK-CEPA kemudian ditandatangani oleh Menteri perdagangan Indonesia Agus Suparmanto Bersama Menteri perdagangan, industri dan energi (MOTIE) Korea Selatan Sung Yun Mo. IK-CEPA mengatur perdagangan barang yang meliputi ketentuan asal barang, elemen penurunan dan penghilangan tarif, dan trade remedies yang meliputi: perdagangan jasa, Kerjasama ekonomi, investasi, serta pengaturan kelembagaan.¹⁰²

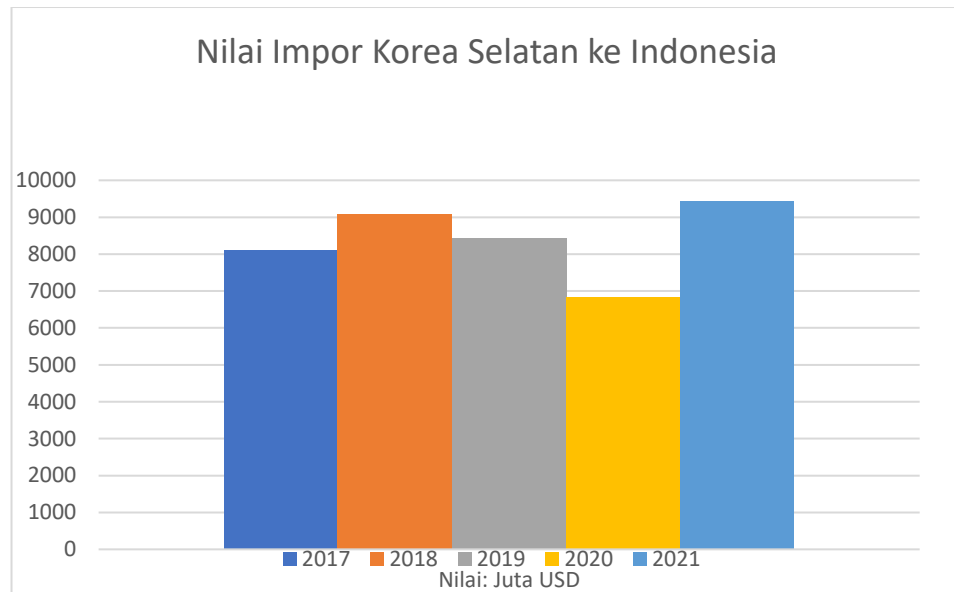
Dalam aspek perdagangan barang kedua negara menyepakati untuk mengeliminasi pos tarif Korea Selatan sebesar 95.54% dan Indonesia sebesar 92.06%. produk Korea Selatan yang tarifnya akan di eliminasi diantaranya *gear box of vehicles, ball bearings, dan paving, unglazed, dan paving hearth or wall tiles*. Sementara Produk Indonesia meliputi T-Shirt, bahan baku minyak pelumas, *blockboard, stearic acid*, rumput laut, dan buah-buahan kering. Apabila dilihat dari nilai impor kedua negara, Indonesia akan menghilangkan tarif impornya dari Korea Selatan sebesar 94% dan Korea Selatan akan menghilangkan tarif impornya dari Indonesia Sebesar 97.3%.¹⁰³ Komoditas ekspor utama Korea Selatan ke Indonesia

¹⁰² “Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,” diakses 25 Oktober 2022, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesiakorea-cepa-tonggak-baru-hubungan-ekonomi-bilateral-kedua-negara>.

¹⁰³ *ibid*

yaitu karet sintetis, produk elektronik, produk baja lembaran, dan kain tenun filmen sintetis. Sementara komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan adalah batu bara, bijih tembaga, kayu lapis, karet alam, dan timah.¹⁰⁴

Grafik 4.1 Nilai Impor Korea Selatan ke Indonesia 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Dari grafik di atas dapat dilihat setelah penerapan kebijakan NSP, impor Korea Selatan pada 2018 mengalami peningkatan mencapai 9 miliar USD. Namun, pada 2019 mengalami penurunan di angka 8.4 miliar USD, penurunan ini merupakan dampak dari perang dagang US dan China. Kemudian pada 2020 impor Korea Selatan ke Indonesia mengalami penurunan kembali di angka 6.8 miliar USD. hal ini diakibatkan oleh wabah

¹⁰⁴ Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, “Ada Perjanjian Dagang, Ekspor RI Ke Korea Dibidik Tumbuh 20 Persen - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” diakses 25 Oktober 2022, <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/ada-perjanjian-dagang-ekspor-ri-ke-korea-dibidik-tumbuh-20-persen-1>.

COVID 19.¹⁰⁵ Kemudian pada 2021 setelah IK-CEPA diratifikasi impor Korea Selatan ke Indonesia mulai membaik menyentuh angka 9.4 miliar USD.

2. Peningkatan Investasi Perusahaan Korea Selatan di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka terhadap investasi asing. Hal ini dapat dilihat dari promosi pemerintah terhadap investor asing akan kemudahan investasi di Indonesia. Korea Selatan melalui kebijakan *New Southern Policy* memiliki tujuan untuk mendorong perusahaan Korea Selatan berpartisipasi dalam proyek pembangunan dan investasi di negara-negara tujuan NSP khususnya Indonesia.

Dalam buku Burchill *The National Interest in International Theory* liberalisme memandang bahwa hubungan antara kemakmuran ekonomi suatu negara dan pasar modal dunia sangat menentukan pada kepentingan nasional. Karena sebagian besar negara tidak mampu menghasilkan kekayaan endogen yang cukup untuk membiayai pembangunan ekonominya. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan suntikan modal dan pengalaman Korea Selatan dalam pembangunan negara melalui investasi asing. Setelah adanya kebijakan NSP Korea Selatan semakin meningkatkan Investasi di Indonesia dengan tujuan untuk semakin memperkuat pengaruh ekonominya di Indonesia. Disamping itu Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah

¹⁰⁵ Tirta Citradi, "Negeri K-Pop Masuk Jurang Resesi, Ekonomi RI Kena Warning," CNBC Indonesia, diakses 3 Januari 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200723133406-4-174894/negeri-k-pop-masuk-jurang-resesi-ekonomi-ri-kena-warning>.

penduduk tinggi, sehingga pasar di Indonesia sangat besar. Hal ini tentunya akan menguntungkan investor Korea Selatan. Dengan demikian hubungan antara Korea Selatan melalui investasi merupakan bentuk positif dari kepentingan nasional liberal, yang membawa peningkatan ekonomi.

Pada 2018 BKPM menyepakati kerja sama bisnis Selatan 6,2 miliar USD atau 91,76 triliun rupiah dengan Korea Selatan. Kesepakatan ini merupakan hasil kunjungan Presiden Jokowi pada 2018. Pada kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menandatangani 15 nota kesepahaman dan enam komitmen investasi yang sifatnya *business to business* antara *private sector* Indonesia dan Korea Selatan, dan satu nota kesepahaman antara BKPM dengan Hyundai Motor Company.¹⁰⁶ Dari kesepakatan ini berdasarkan pandangan liberalisme Korea Selatan melalui kebijakan NSP berhasil menciptakan iklim usaha yang nyaman bagi pengusaha Korea Selatan dengan tingginya penanaman modal asing perusahaan Korea Selatan di Indonesia. Melalui penanaman modal asing yang tinggi, Korea Selatan dapat mencapai kepentingan nasionalnya yaitu menciptakan stabilitas ekonomi dan pasar.

Korea Selatan sendiri merupakan negara yang menduduki tiga besar investasi tertinggi pada kuartal 1 2021. Tercatat dalam tiga bulan pertama pada tahun 2021, Korea Selatan memiliki 1.220 proyek dengan nominal mencapai realisasi 851,1 juta USD. Tingginya investasi Korea Selatan

¹⁰⁶ “Indonesia Tandatangani Kesepakatan Bisnis Rp 91,7 Triliun Dengan Korsel,” BKPM, diakses 1 Januari 2023, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/indonesia-tandatangani-kesepakatan-bisnis-rp-917-triliun-dengan-korsel>.

dipengaruhi oleh investasi mobil listrik yang dilakukan oleh Hyundai. Hyundai akan memproduksi mobil listrik dengan investasi mencapai US\$1,5 miliar atau setara 21 triliun sampai 22 triliun rupiah.¹⁰⁷

Penandatanganan MoU investasi Hyundai dilakukan pada 26 November 2019 yang dihadiri langsung oleh presiden Jokowi di Ulsan Korea Selatan. Investasi ini dilakukan dalam dua tahap. Fase pertama tahun 2019–2021, berfokus pada investasi pabrik pembuatan mobil Hyundai yang berlokasi di Jawa Barat dan akan mengekspor setidaknya 50% dari total produksi. Fase kedua 2022–2030, akan berfokus pada pengembangan pabrik pembuatan mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan, pusat pelatihan, dan produksi Hyundai akan diekspor sebanyak 70%. Produksi akan dimulai pada tahun 2021, dengan kapasitas 70.000 hingga 250.000 unit per tahun, termasuk mobil listrik ke depannya.¹⁰⁸

Faktor Hyundai memilih Indonesia sebagai lokasi pabrik kendaraan listrik karena Indonesia memiliki cadangan bijih nikel laterit yang besar, dimana hal ini merupakan bahan utama yang diperlukan untuk produksi baterai lithium-ion. upah pekerja di Indonesia yang rendah, serta pasar yang besar dan terbuka pada teknologi baru.¹⁰⁹ Dari faktor tersebut Hyundai dapat

¹⁰⁷ C. N. N. Indonesia, “Korsel Duduki 3 Besar Negara dengan Investasi Terbanyak di RI,” ekonomi, diakses 31 Desember 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210426125642-92-634785/korsel-duduki-3-besar-negara-dengan-investasi-terbanyak-di-ri>.

¹⁰⁸ “<https://www.bkpm.go.id/Id/Publikasi/Siaran-Pers/Readmore/2370201/43101>,” BKPM, diakses 31 Desember 2022, <https://www.bkpm.go.id/Id/Publikasi/Siaran-Pers/Readmore/2370201/43101>.

¹⁰⁹ GridOto.com, “Bakal Produksi Mobil Listrik, Ini Alasan Hyundai Pilih Bangun Pabrik di Indonesia Ketimbang Negara Lain di ASEAN - GridOto.com,” diakses 3 Januari 2023,

menghemat biaya produksi sekaligus memperoleh pasar yang baik bagi produknya.

Selain Hyundai, *LG Energy Solution* juga melakukan investasi di Indonesia yaitu dalam bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (*smelter*), pemurnian (*refining*) serta industri prekursor dan katoda dengan nilai rencana investasi mencapai 9,8 miliar USD atau senilai 142 triliun. MoU perjanjian ini ditandatangani oleh Bahlil Lahadalia kepala badan BKPM pada 18 Desember 2020.¹¹⁰

Investasi LG ini juga akan bekerjasama dengan konsorsium baterai BUMN pada seluruh rantai pasok produksi. Kemudian, dalam pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan studi bersama (*joint study*) untuk mengukur secara detail kerja sama yang akan dilakukan kedua pihak dari sektor awal sampai akhir. Baterai yang diproduksi dari proyek ini akan disuplai ke pabrik mobil listrik pertama di Indonesia Hyundai.¹¹¹

Data BKPM per Agustus 2022 menyebutkan bahwa nilai total keseluruhan investasi Indonesia dari perusahaan Korea Selatan mencapai 6,78 miliar USD lebih besar dibanding investasi pada 2021 yang hanya sebesar 1,64 miliar USD. Hal ini menunjukkan bahwa Investasi yang dilakukan oleh Korea Selatan ke Indonesia cukup tinggi. Terdapat alasan

<https://www.gridoto.com/read/222419756/bakal-produksi-mobil-listrik-ini-alasan-hyundai-pilih-bangun-pabrik-di-indonesia-ketimbang-negara-lain-di-asean>.

¹¹⁰ Liputan6.com, "Indonesia Kantongi Investasi Raksasa dari LG Senilai Rp 142 Triliun," liputan6.com, 30 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4445386/indonesia-kantongi-investasi-raksasa-dari-lg-senilai-rp-142-triliun>.

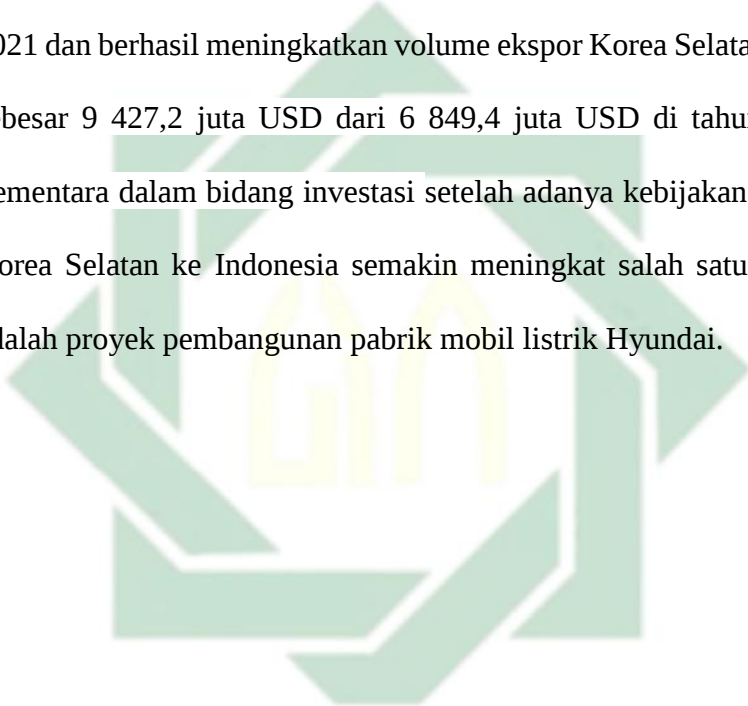
¹¹¹ Ibid.

yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang digemari oleh investor Korea Selatan. Menurut Kim Kyoung-hwa Senior *Researcher at Center for Trade Studies and Cooperation Korea International Trade Association* (KITA) menjelaskan terdapat lima kelebihan Indonesia diantaranya, memiliki basis pasar domestik yang besar, memiliki kebijakan yang aktif terhadap investor asing, gaji pegawai yang murah, Indonesia dan Korea Selatan menjalin hubungan stabil, dan adanya ratifikasi IK-CEPA.¹¹²

Melalui kebijakan NSP Korea Selatan merealisasikan kepentingan nasionalnya dalam pandangan liberalisme yaitu mencapai stabilitas ekonomi di negaranya. Secara spesifik kepentingan nasional yang dimaksud yaitu berjalannya mekanisme pasar sehingga masyarakat dapat dengan tenang dan mudah melakukan aktivitas ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut, dalam bidang perdagangan Korea Selatan membentuk kesepakatan IK-CEPA dengan tujuan mengurangi pos tarif barang sehingga impor Korea Selatan meningkat, pada 2021 nilai impor mencapai 9.4 miliar USD. Sementara dalam bidang investasi, setelah adanya kebijakan NSP investasi Korea Selatan di Indonesia meningkat mencapai 1.6 miliar USD pada 2021. Dengan tingginya perdagangan dan investasi antara Korea Selatan dan Indonesia dapat menciptakan mekanisme pasar yang baik masyarakat dapat dengan tenang dan mudah melakukan aktivitas ekonomi.

¹¹² haa, "Tiga Hal Ini Bikin Investor Korsel 'Jatuh Hati' dengan RI," CNBC Indonesia, diakses 31 Desember 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221011091659-4-378708/tiga-hal-ini-bikin-investor-korsel-jatuh-hati-dengan-ri>.

Dalam implementasinya kebijakan NSP terhadap Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat setelah penetapan kebijakan NSP kedua negara meningkatkan status *special strategic partnership* dengan Indonesia. Disamping itu kedua negara sepakat untuk menetapkan IK-CEPA dengan tujuan menghapuskan pos tarif antara kedua negara yang berjalan sejak 2021 dan berhasil meningkatkan volume ekspor Korea Selatan ke Indonesia sebesar 9 427,2 juta USD dari 6 849,4 juta USD di tahun sebelumnya. Sementara dalam bidang investasi setelah adanya kebijakan NSP investasi Korea Selatan ke Indonesia semakin meningkat salah satu yang terbesar adalah proyek pembangunan pabrik mobil listrik Hyundai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

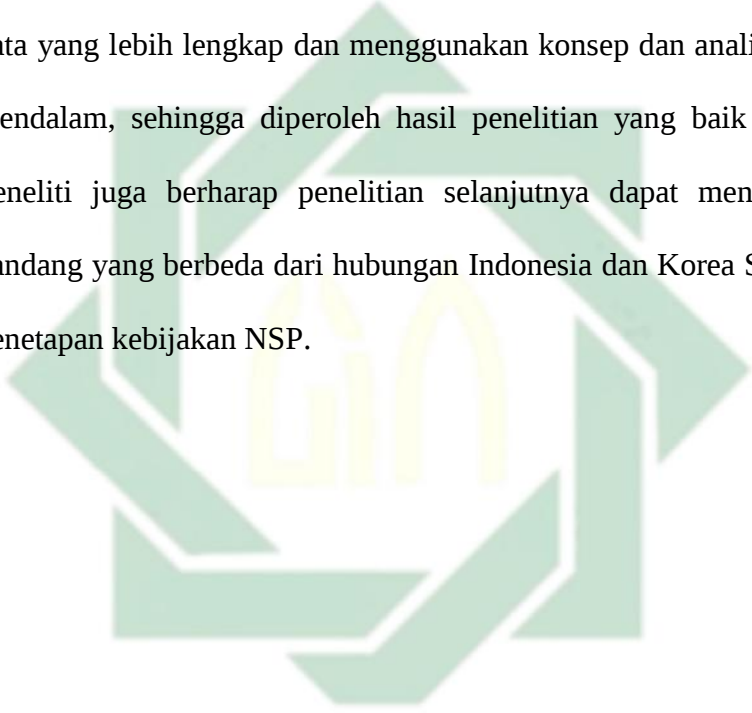
Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan dijabarkan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan Korea Selatan melalui Kebijakan *New Southern Policy* yaitu Melalui hubungan ekonomi dengan Indonesia, masyarakat atau pelaku usaha Korea Selatan dapat semakin mudah mengeksport hasil barangnya dan memperluas pasar ke Indonesia dari adanya IK-CEPA. Selain itu, Korea Selatan melalui kebijakan NSP dapat mendorong dan membantu Perusahaan Korea Selatan untuk memasuki pasar ASEAN khususnya Indonesia melalui memperluas proyek pembangunan atau investasi di negara tujuan NSP khususnya Indonesia. Dalam implementasinya kebijakan NSP di Indonesia berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari penetapan IK-CEPA yang memudahkan pertukaran ekspor impor barang antara kedua negara dan tingginya investasi Korea Selatan di Indonesia setelah adanya kebijakan NSP.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan kepada pembaca terkait kebijakan *New Southern Policy* Korea Selatan dan hubungannya dengan Indonesia. Serta diharapkan penelitian ini

dapat dijadikan salah satu referensi atau rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Dalam penelitian ini peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kekurangan, baik dari segi analisis dan pengumpulan data. Oleh karenanya diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menjabarkan data yang lebih lengkap dan menggunakan konsep dan analisis yang lebih mendalam, sehingga diperoleh hasil penelitian yang baik dan kredibel. Peneliti juga berharap penelitian selanjutnya dapat menyajikan sudut pandang yang berbeda dari hubungan Indonesia dan Korea Selatan setelah penetapan kebijakan NSP.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- “(PDF) Kontribusi Korea Selatan Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi,” diakses 25 Oktober 2022, https://www.researchgate.net/publication/362772136_Kontribusi_Korea_Selatan_Dalam_Pemulihan_Ekonomi_Indonesia_Pasca_Pandemi.
- “2021, Choe Wongi - New Southern Policy. Korea’s Newfound Ambition in Search of Strategic Autonomy | PDF | World Politics | South Korea,” Scribd, diakses 10 Januari 2023, <https://www.scribd.com/document/548630589/2021-Choe-Wongi-New-Southern-Policy-Korea-s-Newfound-Ambition-in-Search-of-Strategic-Autonomy>.
- “Analisis peran ASEAN dalam proses unifikasi Semenanjung Korea | Antaribaba | Gulawentah:Jurnal Studi Sosial,” diakses 16 Januari 2022, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/gulawentah/article/view/9597>.
- “Bertemu Menlu Chung, Menlu Retno Minta Korea Selatan Lindungai Pekerja Migran RI - Dunia Tempo.co,” diakses 1 Agustus 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1476443/bertemu-menlu-chung-menlu-retno-minta-korea-selatan-lindungai-pekerja-migran-ri>.
- “Cambodia-South Korea free trade agreement goes into effect Dec 1, 2022 | The Star,” diakses 9 Januari 2023, <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/11/26/cambodia-south-korea-free-trade-agreement-goes-into-effect-dec-1-2022>.
- “Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,” diakses 1 Agustus 2022, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesiakorea-cepa-tonggak-baru-hubungan-ekonomi-bilateral-kedua-negara>.

“

- “<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2370201/43101>,”
BKPM, diakses 31 Desember 2022,
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2370201/43101>.
- “Hyundai, Naver, dan New Southern Policy Korea Selatan - Ekonomi Bisnis.com,”
diakses 30 Maret 2022,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210430/9/1388775/hyundai-naver-dan-new-southern-policy-korea-selatan>.
- “Indonesia Tandatangani Kesepakatan Bisnis Rp 91,7 Triliun Dengan Korsel,”
BKPM, diakses 1 Januari 2023,
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/indonesia-tandatangani-kesepakatan-bisnis-rp-917-triliun-dengan-korsel>.
- “Jokowi Bersama Presiden Korsel Bahas Kerja Sama Industri Strategis di KTT G20 - Bisnis Liputan6.com,” diakses 1 Agustus 2022,
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4000880/jokowi-bersama-presiden-korsel-bahas-kerja-sama-industri-strategis-di-ktt-g20>.
- “Jokowi Jadi Presiden Pertama Disambut di Istana Changdeok Korsel - News Liputan6.com,” diakses 16 Januari 2022,
<https://www.liputan6.com/news/read/3640927/jokowi-jadi-presiden-pertama-disambut-di-istana-changdeok-korsel>.
- “Jokowi ke Korea Selatan Bangun Kerja Sama Maritim - Nasional Tempo.co,”
diakses 1 Agustus 2022, <https://nasional.tempo.co/read/627552/jokowi-ke-korea-selatan-bangun-kerja-sama-maritim>.
- “Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Seoul, Republik Korea,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses 16 Januari 2022,
<https://kemlu.go.id/seoul/id>.

“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.kemhan.go.id/2012/05/25/indonesia-dan-korea-selatan-bahas-kerjasama-tot-industri-pertahanan.html>.

“Koleksi Citra - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia,” diakses 1 Agustus 2022, https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/photo/?box=detail&id=89&from_box=list_245&hlm=2&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=3&presiden=gusdur.

“Korea Selatan dan Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Demi Proyek Jet Tempur - Dunia Tempo.co,” diakses 1 Agustus 2022, <https://dunia.tempo.co/read/1476560/korea-selatan-dan-indonesia-tingkatkan-kerja-sama-demi-proyek-jet-tempur>.

“Kunjungan Presiden RI ke Korsel Tambah Kepercayaan Investor,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160515152015-92-130798/kunjungan-presiden-ri-ke-korsel-tambah-kepercayaan-investor>.

“Megawati Bertemu Kim Dae Jung - News Liputan6.com,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/31624/megawati-bertemu-kim-dae-jung>.

“Megawati mengunjungi Korea Utara - 2002-03-28,” VOA Indonesia, diakses 1 Agustus 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2002-03-28-2-1-85145162/20835.html>.

“Menimbang Ekspansi Ekonomi China di ASEAN,” SINDOnews.com, diakses 4 Januari 2023, <https://nasional.sindonews.com/berita/1171946/18/menimbang-ekspansi-ekonomi-china-di-asean>.

“Menlu Kang: Indonesia berada di pusat ‘New Southern Policy’ Korea - ANTARA News,” diakses 16 Januari 2022,

<https://www.antaranews.com/berita/821806/menlu-kang-indonesia-berada-di-pusat-new-southern-policy-korea>.

“Neraca Perdagangan RI-Korsel Defisit Terus Sejak 2019 | Databoks,” diakses 25 Oktober 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/23/neraca-perdagangan-ri-korsel-defisit-terus-sejak-2019>.

“Pengaruh China Besar di Asia Termasuk Indonesia,” VOA Indonesia, diakses 4 Januari 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/pengaruh-china-besar-di-asia-termasuk-indonesia/5252330.html>.

“Prabowo Bertemu Menhan Korea Selatan, Sepakat Pererat Kerja Sama Militer,” diakses 1 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/08/15130091/prabowo-bertemu-menhan-korea-selatan-sepakat-pererat-kerja-sama-militer>.

“Prabowo Hadiri Langsung Peluncuran Pesawat Tempur KF-21 Boramae di Korsel,” diakses 1 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/16093931/prabowo-hadiri-langsung-peluncuran-pesawat-tempur-kf-21-boramae-di-korsel>.

“Presiden Moon Janji Akan Bangun Korea Selatan sebagai Negara Pemimpin Dunia,” diakses 16 Januari 2022, http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=58759.

“Presiden SBY Berkunjung ke Korea Selatan - News Liputan6.com,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/145002/presiden-sby-berkunjung-ke-korea-selatan>.

“Sepakati Berbagai Kerja Sama Strategis, Indonesia dan Korea Selatan Saling Dukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” diakses 1 Agustus 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3741/sepakati-berbagai-kerja>.

sama-strategis-indonesia-dan-korea-selatan-saling-dukung-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi.

“Simak! Ini 7 Peran Indonesia dalam ASEAN yang Harus Diketahui,” diakses 19 Mei 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5577699/simak-ini-7-peran-indonesia-dalam-asean-yang-harus-diketahui>.

“Tantangan Ambisi Seoul di Asia Tenggara,” [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/04/15/tantangan-ambisi-seoul-di-asia-tenggara/), 15 April 2021, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/04/15/tantangan-ambisi-seoul-di-asia-tenggara/>.

“The New Southern Policy Plus Progress and Way Forward | World Economy Brief | Publications : Korea Institute for International Economic Policy,” diakses 19 Mei 2022, https://www.kiep.go.kr/gallery.es?mid=a20301000000&bid=0001&list_no=9932&act=view.

“Tiga Hal Ini Bikin Investor Korsel ‘Jatuh Hati’ dengan RI,” CNBC Indonesia, diakses 31 Desember 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221011091659-4-378708/tiga-hal-ini-bikin-investor-korsel-jatuh-hati-dengan-ri>.

“TTWTO VCCI - (FTA) Full Text of Vietnam-Korea Free Trade Agreement (VKFTA),” diakses 9 Januari 2023, <https://wtocenter.vn/chuyen-de/12689-vkfta-full-content>.

“Wapres Minta Korea Selatan Tambah Kuota TKI,” diakses 1 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/27/21514821/Wapres.Minta.Korea.Selatan.Tambah.Kuota.TKI>.

“전략적 동반자 관계란,” diakses 25 Oktober 2022, <https://m.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20100127005009>.

- A'yuni, Suci Millati Qurrota, "Analisa Open Door Policy Turki Terhadap Krisis Kemanusiaan Pengungsi Suriah Tahun 2011-2019" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/38950/>.
- Alamsyah, Bobby Bella, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing Di Kepulauan Riau 2010-2015", *Vol 1 No 1 (2021): Jurnal DIKSHI*.
- Ancho, Inero, Kyungeun Kim, dan Saehoon Park, "Education and South Korea's New Southern Policy: Locus and Prospects," *Jurnal Studi Pemerintahan* 12, no. 1 (18 Februari 2021): 62–75.
- Annisa, Prasasti Ramadhaningtyas, "Peluang Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam New Southern Policy Korea SELATAN" (skripsi, Universitas Mataram, 2020), <http://eprints.unram.ac.id/16936/>.
- antaranews.com, "Menengok 'New Southern Policy' Korea Selatan," Antara News, 12 April 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2095826/menengok-new-southern-policy-korea-selatan>.
- Author TeguhTimur, "Dubes Kim Changbeom: Indonesia Adalah Partner Alami Korea," *Teguh Santosa* (blog), 13 Juli 2018, <https://teguhtimur.com/2018/07/13/dubes-kim-changbeom-indonesia-adalah-partner-alami-korea/>.
- Bainus, Arry, dan Junita Budi Rachman, "Editorial: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (31 Mei 2018): 109, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>.
- Botto, Kathryn, "South Korea Beyond Northeast Asia: How Seoul Is Deepening Ties With India and ASEAN," Carnegie Endowment for International Peace, diakses 25 Oktober 2022, <https://carnegieendowment.org/2021/10/19/south-korea-beyond-northeast-asia-how-seoul-is-deepening-ties-with-india-and-asean-pub-85572>.

Burchill, Scott. *The National Interest in International Relations Theory*, New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2005.

CNN Indonesia, “Korsel Duduki 3 Besar Negara dengan Investasi Terbanyak di RI,” ekonomi, diakses 31 Desember 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210426125642-92-634785/korsel-duduki-3-besar-negara-dengan-investasi-terbanyak-di-ri>.

Citradi, Tirta, “Negeri K-Pop Masuk Jurang Resesi, Ekonomi RI Kena Warning,” CNBC Indonesia, diakses 3 Januari 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200723133406-4-174894/negeri-k-pop-masuk-jurang-resesi-ekonomi-ri-kena-warning>.

Cyril, Presiden Soeharto dari Hawaii Langsung Menuju Korea, HM Soeharto, 06 Juni 2017,

Dhawan, Ranjit Kumar. “Korea’s ‘New Southern Policy’ Towards India: An Analysis,” *Jadavpur Journal of International Relations* 24, no. 1 (1 Juni 2020): 53–72, <https://doi.org/10.1177/0973598420906248>.

Dr Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Zifatama Jawa, 2015.

GridOto.com, “Bakal Produksi Mobil Listrik, Ini Alasan Hyundai Pilih Bangun Pabrik di Indonesia Ketimbang Negara Lain di ASEAN - GridOto.com,” diakses 3 Januari 2023, <https://www.gridoto.com/read/222419756/bakal-produksi-mobil-listrik-ini-alasan-hyundai-pilih-bangun-pabrik-di-indonesia-ketimbang-negara-lain-di-asean>.

HanHae Hong, Mahasiswa Korea Selatan di Khazar University and Research in Eurasian, (wawancara pribadi oleh peneliti pada tanggal 14 Desember 2022 secara daring melalui Zoom Cloud Meetings)

I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia, 2020.

Imagine your korea, “Wawancara Eksklusif Presiden Korea Selatan Mr. Moon Jae In”, diakses 25 Oktober 2022, <https://visitkorea.or.id/article/wawancara-esklusif-presiden-korea-selatan-mr-moon-jae-in>,

IPDForum, “Korea Selatan meningkatkan hubungan dengan negara-negara anggota ASEAN | Indo-Pacific Defense Forum,” 10 April 2018, <https://ipdefenseforum.com/id/2018/04/korea-selatan-meningkatkan-hubungan-dengan-negara-negara-anggota-asean/>.

Jeong, Young Kyu, “Kerjasama Ekonomi Korea Selatan Dan Indonesia Di Masa Kini Dan Masa Depan,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 4, no. 1 (1 Juli 2003): 103–28, <https://doi.org/10.21002/jepi.v4i1.135>.

Kegley, Charles W. and Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, (6th ed). New York: St Martin’s Press, 2001.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hubungan Bilateral [database online]. tersedia di https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu; Internet; diakses pada 01 Agustus 2022.

Kementerian Sekretariat Negara, “Indonesia-Korea Selatan Sepakat Tingkatkan Status Kemitraan | Sekretariat Negara,” diakses 25 Oktober 2022, https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_korea_selatan_sepakat_tingkatkan_status_kemitraan.

Kwak, Sungil “*Korea’s New Southern Policy: Vision and Challenges*,” 12 November 2018, <https://think-asia.org/handle/11540/9407>.

Lapasa, Amanca Pamalina. “Analisis Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi Dalam Merespon Perang Harga Minyak Terhadap Rusia Pada Tahun 2020” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsby.ac.id/49304/>.

Liputan6.com, “Deretan Tokoh Penting yang Ditemui Jokowi di Korea Selatan,” liputan6.com, 26 November 2019,

<https://www.liputan6.com/news/read/4119680/deretan-tokoh-penting-yang-ditemui-jokowi-di-korea-selatan>.

Liputan6.com, “Indonesia Kantongi Investasi Raksasa dari LG Senilai Rp 142 Triliun,” liputan6.com, 30 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4445386/indonesia-kantongi-investasi-raksasa-dari-lg-senilai-rp-142-triliun>.

Makdum, Mohammad Wira Aditya, “Analisis Munculnya Kebijakan New Southern Policy Korea Selatan Di Bawah Administrasi Moon Jae In Tahun 2017” (Undergraduate, Upn “Veteran” Jawa Timur, 2020), <http://repository.upnjatim.ac.id/2276/>.

Manan, Munafrizal, “*Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques*,” *Jurnal Global & Strategis* 9 (14 Desember 2017): 175, <https://doi.org/10.20473/jgs.9.2.2015.175-189>.

Mas’oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, pertama, Jakarta:LP3ES, 1990.

Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations* 4th edition, New York: Alfred A. Knopf, 196.

Morgenthau, Hans. J. “Another Great Debate. The National Interest of the United States,” *The American Political Science Review* XLVI, 1952.

Muchsya, Audrey Dylania. “Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia Dalam Hubungan Special Strategic Partnership Di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019,” 19 Juli 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56866>.

Ningsih, Puji, “BAB II LANDASAN TEORI A. Potensi Ancaman,” diakses 30 Maret 2022, https://www.academia.edu/15796155/BAB_II_LANDASAN_TEORI_A_Potensi_Ancaman.

Nuechterlein, Donald Edwin, *America Recommitted: A Superpower Assesses Its Role in a Turbulent World 2nd edition*, Lexington, Kentucky: The University of Press of Kentucky, 2001.

Okezone, “Jokowi Temui Pengusaha hingga Super Junior di Indonesia-Korea Business Summit 2017 : Okezone Economy,” <https://economy.okezone.com/>, 14 Maret 2017, <https://economy.okezone.com/read/2017/03/14/320/1641996/jokowi-temui-pengusaha-hingga-super-junior-di-indonesia-korea-business-summit-2017>.

Paramitha, Made Cynthia, A.A. Ayu Intan Parameswari, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha “Upaya Diplomasi Korea Selatan Memperbaiki Hubungan Ekonomi Dengan Tiongkok Pasca Pemasalahan Terminal High Altitude Area Defense (Thaad)” Vol 1 No 1 (2021): Jurnal Dikshi

Pratama, Mohd Rahmaddhoni, dan Fitriyah Fitriyah, “Kepemimpinan Tri Rismaharini dalam Mengatasi Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (24 Juni 2021): 181–89, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.608>.

PT Viva Media Baru- Viva, “Ini Tiga Sektor Investasi yang Ditawarkan RI ke Korsel,” 23 April 2015, <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/617493-ini-tiga-sektor-investasi-yang-ditawarkan-ri-ke-korsel>.

Pujayanti, Adrini. Potensi dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan, bidang hubungan internasional info singkat Vol.XI, No. 23, Desember 2019.

Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, “Ada Perjanjian Dagang, Ekspor RI Ke Korea Dibidik Tumbuh 20 Persen - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” diakses 25 Oktober 2022, <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/media-corner/ada-perjanjian-dagang-ekspor-ri-ke-korea-dibidik-tumbuh-20-persen-1>.

Puspitasari, Retnaningtyas, “Analisis Peran Middle Power Korea Selatan Terhadap Asean Melalui New Southern Policy,” 2021, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/84486/Analisis-Peran-Middle-Power-Korea-Selatan-Terhadap-Asean-Melalui-New-Southern-Policy>.

Resmi, Sita. “PERANAN ASIA-EUROPE MEETING (ASEM) DALAM PERDAGANGAN EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA KE UNI EROPA” (other, PERPUSTAKAAN, 2018), <http://repository.unpas.ac.id/35635/>.

Rohmaniah, Annisa. “PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA ASEAN-KOREA SELATAN MELALUI ASEAN-KOREA CENTRE,” 483, diakses 16 Januari 2022, <https://core.ac.uk/reader/234030476>.

Sistia, Tania Gita, “Diplomasi publik Korea Selatan ke Vietnam, Singapura dan Indonesia,” 2019, <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/repository.unpar.ac.id/handle/123456789/10777>.

Suwarman, Eufronius dkk., “RIVALITAS GEOPOLITIK AMERIKA SERIKAT & TIONGKOK DI MYANMAR,” diakses 30 Maret 2022, <https://core.ac.uk/display/236430268>.

Suyanto, Bagong, dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Prenada Media, 2015).

Thuzar, Moe “The New Southern Policy Plus: What’s New and What’s Next?,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 19 Maret 2021), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3820360>.

Wahyuningsih, Khirana, “Faktor-Faktor Korea Selatan Meningkatkan Strategic Partnership Menjadi Special Strategic Partnership Terhadap Indonesia Tahun 2017,” 18 Mei 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57083>.

Wibisono, Belita Ayu Silviana, “Penurunan Perdagangan Bilateral Indonesia-Korea Selatan Dalam Kerjasama Working Level Task Force Meeting, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 5, Nomor 4, 2017: 1381-1396

Wongi, Choe, “‘New Southern Policy’: Korea’s New found Ambition in Search of Strategic Autonomy,”.

